



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Buku Perkembangan Profil Kependudukan Kabupaten Bireuen Tahun 2024.

Shalawat beserta Salam kita persembahkan pula kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari alam Jahiliyah ke Alam yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan.

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bireuen Tahun 2024 ini merupakan salah satu langkah strategis untuk memahami secara lebih mendalam dinamika dan perubahan yang terjadi pada aspek kependudukan di kabupaten Bireuen. Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang komprehensif mengenai jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk di Kabupaten Bireuen, serta memberikan gambaran tentang bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi perkembangan kependudukan. Melalui penyajian data yang akurat dan terkini, buku ini bertujuan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data, serta memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, pemahaman terhadap tren demografi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat penting. Buku profil ini menyajikan informasi yang relevan untuk merencanakan kebijakan yang tepat guna, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun ekonomi.

Harapan kami, dengan terbitnya Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bireuen Tahun 2024 ini, semua pihak dapat memanfaatkannya sebagai bahan referensi yang berguna dalam perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Buku ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan kependudukan yang berkelanjutan, serta mendorong terciptanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan Kabupaten Bireuen yang lebih maju dan sejahtera.

Bireuen, Juni 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen



Muhammad Diah, S.Ag
Pembina Utama Muda
Nip. 197012241999111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup.....	3
D. Pengertian Umum.....	2
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BIREUEN	9
A. Letak Geografis Daerah.....	9
1. Letak dan Luas Wilayah.....	9
2. Tata Guna Tanah	10
B. Kondisi Demografi Daerah	12
1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk	12
2. Sturktur Usia	12
3. Komposisi Etnis dan Bahasa.....	13
4. Pendidikan.....	13
5. Kesehatan.....	13
6. Ekonomi dan Pekerjaan	14
7. Urbanisasi dan Distribusi Penduduk	15
8. Migrasi.....	15
9. Struktur Keluarga dan Rumah Tangga	15
10. Infrastruktur dan Aksesibilitas	15
11. Kesenjangan Sosial dan Pembangunan	16
12. Budaya dan Sosial	16
13. Tantangan Demografi	16
C. Gambaran Ekonomi Daerah.....	17
1. Struktur Ekonomi	17
2. Pertanian dan Perkebunan	18
3. Perikanan	18
4. Peternakan	18
5. Industri Pengolahan	19
6. Perdagangan dan Pasar.....	19
7. Sektor Jasa.....	19
8. Infrastruktur Ekonomi.....	20
9. Investasi dan Pengembangan Ekonomi	20

10. Tantangan Ekonomi	20
11. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah.....	21
D. Potensi Daerah	21
1. Pertanian	21
2. Perikanan	22
3. Peternakan	22
4. Industri dan Kerajinan.....	22
5. Perdagangan dan Jasa.....	23
6. Pariwisata	23
7. Sumber Daya Alam.....	23
8. Infrastruktur dan Konektivitas	24
9. Sumber Daya Manusia	24
10. Dukungan Pemerintah	24
E. Sumber Data	21
BAB III SUMBER DATA	25
BAB IV. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	26
4.1 KUANTITAS PENDUDUK	26
A. Jumlah Persebaran Penduduk	26
1. Jumlah Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin /Kecamatan	26
2. Kepadatan Penduduk.....	28
3. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	29
B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	31
1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	31
a. Rasio Jenis Kelamin.....	32
b. Piramida Penduduk	32
c. Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>).....	34
2. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin.....	37
a. Angka Perkawinan Kasar	37
b. Angka Perkawinan Umum	38
c. Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umum.....	40
d. Rata-rata Umur Kawin Pertama (<i>Singulate Mean Age at Marriage-SMAM</i>)	40
e. Angka Perceraian Kasar	41
f. Angka Perceraian Umum.....	43
3. Keluarga.....	43
a. Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga.....	44
b. Hubungan dengan Kepala Keluarga	45
c. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur	46
d. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47

e. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin	48
f. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan	49
g. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan	51
4. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	52
a. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	52
b. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	53
c. Jumlah Penduduk Menurut Agama	56
d. Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan	57
5. Kelahiran	57
a. Angka Kelahiran Umum	58
b. Angka Kelahiran Kasar	58
6. Kematian	59
4.2 KUALITAS PENDUDUK	61
A. Kesehatan	61
1. Kelahiran	61
a. Angka Kelahiran Menurut Umur	61
b. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	62
c. Rasio Anak dan Ibu (<i>Child Women Ratio/CWR</i>)	62
2. Kematian	63
a. Angka Kematian Bayi	63
b. Angka Kematian Neonatal	64
c. Angka Kematian Post Neonatal	65
d. Angka Kematian Anak	66
e. Angka Kematian Balita	66
f. Angka Kematian Ibu	67
B. Pendidikan	69
1. Angka Melek Huruf	69
2. Angka Partisipasi Pasar (APK)	69
3. Angka Partisipasi Murni (APM)	70
C. Ekonomi	71
1. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja	71
D. Sosial	73
1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	73
2. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat	74
3. Proporsi Penduduk Penerima Askeskin	76
4.3 MOBILITAS PENDUDUK	77
1. Migrasi Masuk	78
2. Migrasi Keluar	80

BAB V. KEPEMILIKAN DOKUMEN PENDUDUK.....	82
a. Kepemilikan Kartu Keluarga.....	82
b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.....	83
c. Kepemilikan Kartu Indentitas Anak (KIA).....	84
d. Kepemilikan Akta	86
1. Akta Kelahiran.....	86
2. Akta Perkawinan	87
3. Akta Perceraian.....	88
4. Akta Kematian.....	89
 BAB VI. KESIMPULAN	 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kependudukan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan suatu daerah, karena berkaitan langsung dengan ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Kabupaten Bireuen sebagai salah satu kabupaten strategis di Provinsi Aceh, mengalami dinamika kependudukan yang signifikan dari tahun ke tahun. Perubahan jumlah penduduk, distribusi geografis, struktur umur, dan mobilitas penduduk menjadi faktor yang perlu dikaji secara periodik untuk menunjang perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pentingnya data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terpadu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menegaskan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Data kependudukan yang valid menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, penyusunan profil kependudukan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Kependudukan, yang memberikan pedoman teknis dalam penyusunan dokumen profil kependudukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa profil kependudukan harus mencakup aspek jumlah penduduk, struktur dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, persebaran, dan indikator sosial ekonomi lainnya. Tujuannya adalah untuk menyediakan data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan di berbagai sektor.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bireuen disusun sebagai bentuk implementasi dari ketentuan-ketentuan tersebut, serta sebagai sarana

dokumentasi dan publikasi resmi kondisi demografis daerah. Buku ini menyajikan data kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan dinamika penduduk secara menyeluruh, termasuk perkembangan jumlah penduduk, migrasi, angka kelahiran dan kematian, kepemilikan dokumen kependudukan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penyusunan buku ini dilakukan dengan mengacu pada prinsip keterpaduan data dan koordinasi lintas sektor, khususnya antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan instansi terkait lainnya.

Lebih jauh, profil ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen statistik, tetapi juga sebagai alat bantu perencanaan dan evaluasi pembangunan. Data yang tersaji diharapkan menjadi rujukan utama bagi para pemangku kebijakan, akademisi, peneliti, dan masyarakat umum dalam memahami kondisi kependudukan di Kabupaten Bireuen. Keberadaan buku ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem perencanaan pembangunan yang berbasis data dan sesuai dengan amanat regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, penyusunan buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bireuen merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola kependudukan yang efektif dan akuntabel. Melalui buku ini, diharapkan tercipta sinergi antara data kependudukan dan kebijakan pembangunan daerah, sehingga setiap program dan intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Bireuen adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai dinamika dan tren kependudukan di wilayah tersebut. Buku ini bertujuan untuk menyajikan data terkini tentang jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk, serta berbagai aspek sosial-ekonomi yang mempengaruhi perkembangan penduduk. Selain itu, penyusunan buku profil ini juga dimaksudkan untuk menjadi bahan referensi bagi perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, serta evaluasi program-program yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia di Kabupaten Bireuen. Dengan adanya buku ini, diharapkan para pengambil kebijakan dan masyarakat dapat

lebih memahami tantangan dan peluang yang ada dalam konteks kependudukan serta merancang langkah-langkah strategis yang lebih tepat sasaran.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Bireuen mencakup pengumpulan dan pengolahan data kependudukan yang mencakup berbagai aspek, seperti jumlah, distribusi, komposisi, serta karakteristik penduduk di wilayah tersebut. Data ini diperoleh dari sumber-sumber terpercaya, seperti sensus penduduk, survei, dan catatan administrasi kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya. Selain itu, buku ini juga akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan kependudukan, seperti tingkat kelahiran, kematian, migrasi, dan dinamika sosial-ekonomi yang ada di Kabupaten Bireuen.

Dalam ruang lingkup tersebut, buku ini juga mencakup analisis mendalam terhadap tren perubahan demografis yang terjadi selama periode tertentu. Analisis ini bertujuan untuk memahami pola-pola yang muncul dari data kependudukan dan untuk memprediksi perkembangan kependudukan di masa depan. Buku ini akan menyajikan informasi mengenai pertumbuhan penduduk, struktur umur, distribusi geografis, dan karakteristik sosial-ekonomi penduduk, serta dampaknya terhadap perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi dinamika kependudukan, seperti kebijakan pemerintah, program pembangunan, dan perubahan lingkungan, juga akan dibahas secara komprehensif.

Ruang lingkup penyusunan buku profil ini juga melibatkan pemetaan masalah kependudukan yang dihadapi Kabupaten Bireuen, seperti ketimpangan distribusi penduduk, urbanisasi, dan tantangan dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi demografis yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efektif. Dengan demikian, ruang lingkup buku ini tidak hanya terbatas pada data dan analisis kependudukan, tetapi juga mencakup rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

D. Pengertian Umum

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
3. **Perkembangan** kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan;
4. **Data kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan;
6. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
7. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat;
8. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak;
9. **Mobilitas Penduduk** adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah geografis kewilayah lain dalam kurun waktu tertentu;
10. **Mobilitas penduduk permanen (migrasi)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
11. **Mobilitas penduduk non permanen (circulation/sirkuler)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik atau nglaju (*commuting*) dan menginap/mondok;

12. **Mobilitas penduduk ulang-alik atau Nglaju (*commuting*)** adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;
13. **Persebaran Penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;
14. **Kematian atau mortalitas menurut WHO** adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;
15. **Penduduk Musiman merupakan** salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domilisinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;
16. **Migrasi kembali (*return migration*)** adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda;
17. **Migrasi semasa hidup (*life time migration*)** adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan sensus tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
18. **Migrasi Risen (*recent migration*)** adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (desa/kec/kab/provinsi) dimana pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu;
19. **Angka Migrasi Masuk** adalah banyaknya migrasi masuk kedalam suatu wilayah di setiap seribu penduduk dalam satu tahun;
20. **Angka Migrasi Keluarga** adalah banyaknya migrasi keluar dari suatu wilayah di setiap seribu penduduk dalam satu tahun;
21. **Urbanisasi** adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perKabupatenan dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi per Kabupaten, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perKabupatenan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya;
22. **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
23. **Penduduk yang termasuk angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha.
24. **Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan melaksanakan kegiatan lainnya.

25. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
26. **Tingkat partisipasi angkatan kerja** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
27. **Mencari pekerjaan atau penganggur terbuka** adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha.
28. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi, selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah.
29. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga, dan anaknya yang membantu rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapat upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
30. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
31. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.
32. **Angka pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;
33. **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas;
34. **Lahir hidup** adalah :
 - a. Suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot;
 - b. Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya;
35. **Lahir mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
36. **Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)** adalah rata-rata banyaknya anak yang akan dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksinya jika ia mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung;

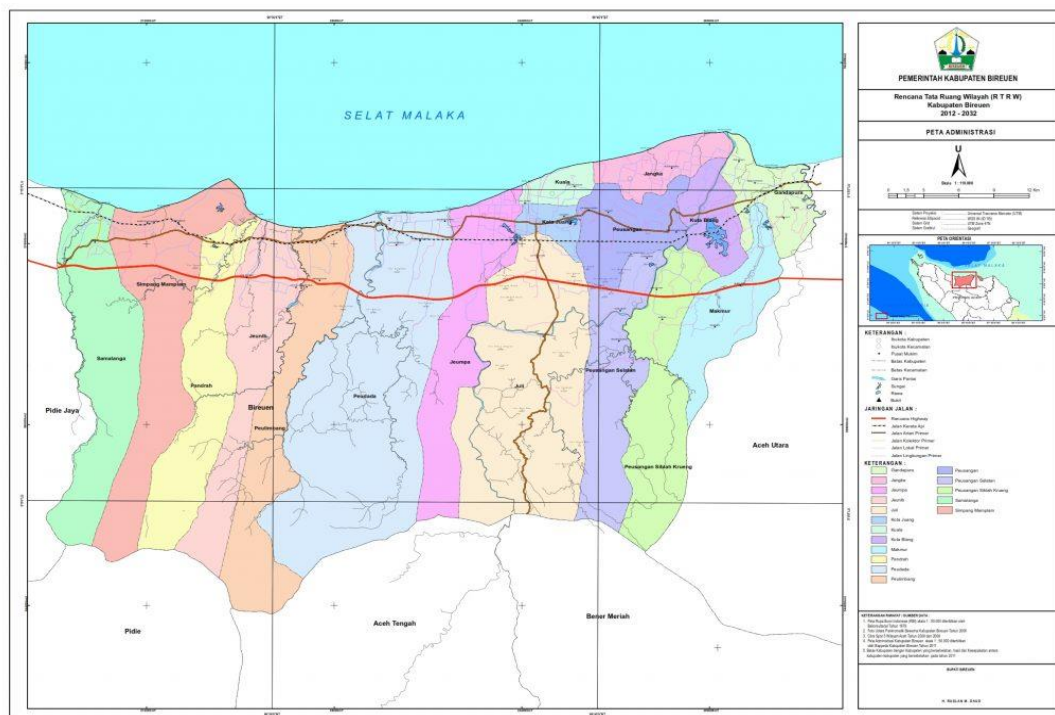
37. **Angka Kematian Bayi Baru Lahir** adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28) hari pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
38. **Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir** adalah banyaknya kematian bayi lepas baru lahir(usia 1-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
39. **Angka Kematian Bayi/IMR** adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
40. **Angka Kematian Ibu/MMR** adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya;
41. **Angka Kematian Kasar** adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk;
42. **Penduduk Melek Huruf** adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang telah bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, buta latin, dan buta angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengalaman dasar;
43. **Angka Partisipasi Total** adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu umur 7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24 tahun;
44. **Angka Partisipasi Murni/APM** adalah presentase jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16-18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan;
45. **Angka Partisipasi Kasar/APK** adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu;
46. **Pertumbuhan penduduk** adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto;
47. **Angka Pertumbuhan Penduduk** adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya;

48. **Proporsi penduduk** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin;
49. **Rasio jenis kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan;
50. **Piramida penduduk** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik;
51. **Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (dependency ratio)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif;
52. **Rasio kepadatan penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu;
53. **Angka Perkawinan Kasar** adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu;
54. **Angka Perkawinan umum** adalah angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu;
55. **Angka Perceraian Kasar** adalah angka yang menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu;
56. **Angka Perceraian Umum** adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu.

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BIREUEN

A. Letak Geografis Daerah

Kabupaten Bireuen sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Utara. Kemudian, melalui Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 dan selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000, Bireuen dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yang otonom. Secara geografis letak Kabupaten Bireuen sangat strategis karena berada dibagian pantai timur Sumatera dan pada jalur perdagangan daerah, yaitu tepatnya pada jalur lalu lintas Banda Aceh-Medan. Kabupaten ini berada pada posisi $4^{\circ} 53' 20,3'' - 5^{\circ} 16' 25,8''$ Lintang Utara dan $96^{\circ} 55' 30,1'' - 96^{\circ} 19' 45,9''$ Bujur Timur, serta berada pada ketinggian 0- 2637 meter dari permukaan laut (DPL).



Peta Administrasi _RBI

Sejak tahun 2004, secara administratif Kabupaten Bireuen memiliki 17 kecamatan, terdiri dari 609 desa dan 75 kemukiman dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Selat Malaka;
- Sebelah Tenggara dengan Kabupaten Bener Meriah;
- Sebelah Selatan dengan Aceh Tengah;

Sebelah Barat Daya dengan Kabupaten Pidie;
 Sebelah Barat dengan Kabupaten Pidie Jaya; dan
 Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Utara.

TABEL 2.1
JUMLAH KECAMATAN, KEMUKIMAN, DAN
GAMPONG/KELURAHAN DALAM
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ² /sq.km)*	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
1.	Samalanga	141,33	5	46
2.	Simpang Mamplam	157,81	3	41
3.	Pandrah	113,93	3	19
4.	Jeunieb	112,49	6	43
5.	Peulimbang	118,32	3	22
6.	Peudada	319,60	6	52
7.	Juli	231,09	4	36
8.	Jeumpa	108,99	5	42
9.	Kota Juang	16,90	4	23
10.	Kuala	17,08	4	20
11.	Jangka	37,71	5	46
12.	Peusangan	59,03	9	69
13.	Peusangan Selatan	94,09	3	21
14.	Peusangan Sb. Krueng	111,20	3	21
15.	Makmur	71,69	4	27
16.	Gandapura	38,68	4	40
17.	Kuta Blang	47,04	4	41
Jumlah		1.796,98	75	609

Sumber : Data Statistik Kab.Bireuen

Kondisi Topografi

Dari luas wilayah tersebut sebanyak 20,22 persen atau seluas 38.453 ha merupakan kawasan ladang/hutan, 16,11 persen atau 30.631 ha dimanfaatkan untuk tegalan/kebun, seluas 29.135 ha (15,32 persen) dimanfaatkan untuk lahan perkebunan, serta seluas 22.948 ha (12,07 persen) dari luas wilayah diperuntukkan sebagai areal persawahan. Secara rinci tentang penggunaan lahan ini diperlihatkan dalam tabel di bawah ini.

TABEL 2.2
JENIS DAN PENGGUNAAN LAHAN
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

No.	Jenis PenggunaanLahan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Persawahan	22.948	12,07
2.	Pekarangan dan Pemukiman	16.625	8,74
3.	Tegalan/Kebun	30.631	16,11
4.	Ladang/Hutan	38.453	20,22
5.	Padang Rumput	2.045	1,08
6.	Hutan Rakyat	15.156	7,97
7.	Hutan Negara	19.539	10,27
8.	Perkebunan	29.135	15,32
9.	Rawa	1.998	1,05
10.	Tambak	5.070	2,66
11.	Kolam/Tebat/Empang	52	0,03
12.	Sementara tidak digunakan	830	0,44
13.	Lain-lain	8.202	4,31
Jumlah		1.797	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Bireuen, 2024

Selain itu, di Kabupaten Bireuen dijumpai 6 buah sungai yang bermuara ke Selat Malaka, yaitu Krueng Samalanga, Krueng Pandrah, Krueng Jeunieb, Krueng Nalan, Krueng Peudada, dan Krueng Peusangan. Di samping itu, terdapat satu sungai yaitu Krueng Simpo yang bermuara ke Peusangan. Semua sungai-sungai tersebut bermanfaat besar bagi masyarakat daerah ini, baik untuk mengairi lahan maupun untuk keperluan lainnya.

B. Kondisi Demografi Daerah

Kabupaten Bireuen adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia, yang memiliki karakteristik demografi yang beragam dan dinamis. Kondisi demografi Kabupaten Bireuen mencakup berbagai aspek seperti jumlah penduduk, struktur usia, komposisi etnis, pendidikan, kesehatan, dan aspek sosial lainnya. Berikut adalah deskripsi lengkap dan detail mengenai kondisi demografi Kabupaten Bireuen:

1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan

a. Jumlah Penduduk :

Menurut Data Registrasi penduduk dan pencatatan sipil yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) operasional status 31 Desember 2022, maupun laporan secara manual. Data Konsolidasi Bersih (DKB) tahun terbaru (2023), jumlah penduduk kabupaten ini mencapai sekitar 451.952 jiwa. Angka ini terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan alami dan migrasi.

b. Kepadatan Penduduk :

Kabupaten Bireuen memiliki luas wilayah sekitar 1.796,97 km², yang menghasilkan kepadatan penduduk sekitar 2,38 jiwa per km². Kepadatan ini bervariasi antara daerah perkotaan dan pedesaan, dengan konsentrasi penduduk yang lebih tinggi di pusat-pusat kota seperti Bireuen dan kota-kota lainnya.

2. Struktur Usia

a. Distribusi Usia

Populasi Kabupaten Bireuen didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun), yang mencakup sekitar 65% dari total penduduk. Kelompok usia anak-anak (0-14 tahun) menyumbang sekitar 25%, dan kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) sekitar 10%.

b. Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten ini menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk yang moderat, dengan angka pertumbuhan tahunan sekitar 1,2%.

3. Komposisi Etnis dan Bahasa

a. Etnis

Mayoritas penduduk Kabupaten Bireuen adalah etnis Aceh, khususnya dari sub-suku seperti Gayo, Alas, dan sub-suku lainnya yang memiliki ciri khas budaya masing-masing. Selain itu, terdapat juga minoritas etnis Melayu dan orang-orang dari suku lain yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

b. Bahasa

Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah Bahasa Aceh dan Bahasa Indonesia. Bahasa Aceh menjadi bahasa ibu bagi sebagian besar penduduk, sementara Bahasa Indonesia digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, dan komunikasi antar etnis.

c. Agama

Mayoritas Muslim: Sekitar 99% penduduk Kabupaten Bireuen memeluk agama Islam, khususnya Islam Sunni yang mayoritas. Terdapat juga komunitas minoritas agama lain seperti Kristen, Hindu, dan Budha, namun jumlahnya sangat kecil.

d. Praktik Keagamaan

Kehidupan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, salat berjamaah, dan perayaan hari besar Islam yang rutin dilaksanakan.

4. Pendidikan

a. Tingkat Pendidikan:

Sebagian besar penduduk Kabupaten Bireuen memiliki tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) yang cukup baik. Tingkat pendidikan menengah (SMA) dan pendidikan tinggi (diploma dan sarjana) juga meningkat, terutama di kota-kota besar dalam kabupaten.

b. Akses Pendidikan:

Kabupaten Bireuen memiliki jaringan sekolah yang cukup luas, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, serta beberapa institusi pendidikan tinggi seperti politeknik dan universitas swasta yang menyediakan pendidikan vokasional dan akademik.

c. Tantangan Pendidikan:

Meskipun akses pendidikan cukup baik, masih terdapat tantangan dalam hal kualitas pendidikan, fasilitas sekolah, dan ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas, terutama di daerah pedesaan.

5. Kesehatan

a. Fasilitas Kesehatan

Kabupaten Bireuen memiliki beberapa fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bireuen adalah fasilitas kesehatan utama yang melayani kebutuhan medis penduduk.

b. Indikator Kesehatan

- Harapan Hidup

Rata-rata harapan hidup di Kabupaten Bireuen sekitar 70 tahun.

Angka Kematian: Angka kematian balita dan ibu melahirkan terus menurun berkat peningkatan akses layanan kesehatan.

- Penyakit Menular dan Tidak Menular

Masih terdapat tantangan terkait penyakit menular seperti tuberkulosis dan malaria, serta peningkatan kasus penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi.

- Program Kesehatan

Pemerintah daerah aktif menjalankan program kesehatan seperti imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan program keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

6. Ekonomi dan Pekerjaan

a. Distribusi Pekerjaan

Mayoritas penduduk Kabupaten Bireuen bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan. Sektor jasa dan perdagangan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kesempatan kerja.

b. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran di Kabupaten Bireuen relatif rendah, namun masih terdapat tantangan dalam penciptaan lapangan kerja yang cukup untuk menampung pertumbuhan penduduk.

c. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita masih tergolong rendah, namun mengalami peningkatan seiring dengan pengembangan sektor ekonomi lokal.

7. Urbanisasi dan Distribusi Penduduk

a. Urbanisasi

Proses urbanisasi di Kabupaten Bireuen relatif moderat, dengan sebagian besar penduduk masih tinggal di daerah pedesaan. Namun, kota Bireuen sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi menarik penduduk dari daerah sekitarnya.

b. Distribusi Penduduk

Penduduk tersebar di berbagai desa dan kecamatan dengan konsentrasi yang lebih tinggi di pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan.

8. Migrasi

a. Migrasi Internal: Kabupaten Bireuen mengalami migrasi internal, baik pendatang dari daerah lain yang mencari peluang kerja maupun penduduk lokal yang migrasi ke kota besar untuk pendidikan dan pekerjaan.

b. Migrasi Eksternal: Sebagian kecil penduduk Kabupaten Bireuen juga bekerja di luar negeri, terutama di negara-negara Timur Tengah, yang memberikan kontribusi melalui remitansi.

9. Struktur Keluarga dan Rumah Tangga

a. Ukuran Rumah Tangga:

Rata-rata ukuran rumah tangga di Kabupaten Bireuen sekitar 4-5 anggota per keluarga. Struktur keluarga umumnya masih bersifat tradisional dengan keluarga besar tinggal bersama.

b. Komposisi Rumah Tangga

Mayoritas rumah tangga terdiri dari pasangan suami istri dengan anak-anak. Struktur keluarga juga melibatkan peran kekerabatan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari.

10. Infrastruktur dan Aksesibilitas

a. Transportasi

Infrastruktur transportasi yang baik mendukung mobilitas penduduk. Jalan raya yang menghubungkan Bireuen dengan kota-kota besar lain di Aceh mempermudah akses ke berbagai layanan dan peluang ekonomi.

b. Telekomunikasi

Akses ke layanan telekomunikasi dan internet semakin meningkat, membantu perkembangan ekonomi digital dan akses informasi bagi penduduk.

11. Kesenjangan Sosial dan Pembangunan

a. Kesenjangan Ekonomi

Meskipun terdapat peningkatan ekonomi, masih terdapat kesenjangan antara penduduk kota dan desa, serta antara kelompok usia produktif dan non-produktif.

b. Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah daerah berfokus pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

12. Budaya dan Sosial

a. Kehidupan Sosial

Masyarakat Bireuen memiliki kehidupan sosial yang kuat dengan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan yang tinggi. Kegiatan sosial dan budaya sering kali diadakan untuk mempererat hubungan antar warga.

c. Budaya dan Tradisi

Kekayaan budaya Aceh tercermin dalam berbagai tradisi, seni, dan upacara adat yang tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Bireuen.

13. Tantangan Demografi

a. Pertumbuhan Penduduk yang Cepat

Pertumbuhan penduduk yang relatif cepat memerlukan peningkatan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

c. Pengangguran dan Kualitas Pekerjaan

Menyediakan pekerjaan yang layak dan meningkatkan kualitas lapangan kerja menjadi tantangan utama untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Kesehatan dan Pendidikan

Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan masih menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Kondisi demografi Kabupaten Bireuen menunjukkan potensi yang kuat untuk pertumbuhan dan pengembangan, dengan mayoritas penduduk berada dalam usia produktif, serta dukungan sektor pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat, Kabupaten Bireuen memiliki landasan yang baik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti

kesenjangan sosial, pengangguran, dan peningkatan kualitas layanan publik perlu diatasi melalui kebijakan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang kondisi demografi ini, perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi dapat lebih terarah untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi penduduk Kabupaten Bireuen secara efektif dan efisien.

C. Gambaran Ekonomi Daerah

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten yang memiliki peran penting dalam perekonomian Provinsi Aceh. Dengan potensi yang besar di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, industri, dan jasa, Kabupaten Bireuen terus berkembang menjadi pusat ekonomi regional. Berikut adalah deskripsi lengkap dan mendetail mengenai gambaran ekonomi daerah Kabupaten Bireuen :

1. Struktur Ekonomi

a. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Bireuen, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Komoditas utama meliputi padi, kelapa sawit, kakao, dan kopi. Pertanian di Bireuen masih didominasi oleh usaha tani rakyat dengan metode tradisional, meskipun beberapa area telah mulai menerapkan teknologi modern.

b. Sektor Perikanan

Perikanan juga memainkan peran penting, terutama perikanan laut. Kabupaten Bireuen memiliki garis pantai yang panjang, dengan sektor perikanan tangkap yang mengandalkan ikan seperti tuna, cakalang, dan tongkol. Selain itu, budidaya perikanan air tawar juga berkembang, terutama di wilayah pedesaan.

c. Sektor Industri

Industri di Kabupaten Bireuen sebagian besar terdiri dari industri kecil dan menengah (IKM) yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Selain itu, industri kerajinan tangan, seperti anyaman dan tenun tradisional, juga cukup berkembang dan memiliki pasar lokal serta regional.

d. Sektor Jasa dan Perdagangan

Perdagangan menjadi salah satu sektor yang dinamis di Bireuen, terutama berkat lokasi strategisnya di jalur lintas Sumatra. Pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta usaha perdagangan skala kecil dan menengah menyokong perekonomian lokal. Sektor jasa, terutama transportasi dan penginapan, juga terus berkembang seiring dengan peningkatan mobilitas dan kegiatan ekonomi.

2. Pertanian dan Perkebunan

a. Padi

Padi adalah komoditas utama dengan lahan sawah yang luas dan sistem irigasi yang memadai. Bireuen sering dianggap sebagai salah satu lumbung padi di Aceh, dengan hasil panen yang tidak hanya mencukupi kebutuhan lokal tetapi juga dipasarkan ke daerah lain.

b. Kelapa Sawit

Perkebunan kelapa sawit di Bireuen telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Banyak petani beralih ke komoditas ini karena prospek pasar yang stabil dan dukungan dari pemerintah daerah.

d. Kakao dan Kopi

Selain sawit, kakao dan kopi juga menjadi komoditas perkebunan yang penting. Produk kakao dan kopi dari Bireuen dikenal memiliki kualitas yang baik, dengan sebagian produksi diekspor ke pasar internasional.

3. Perikanan

a. Perikanan Laut

Dengan akses ke Samudera Hindia, Bireuen memiliki potensi besar di sektor perikanan laut. Armada nelayan tradisional dan modern bekerja untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya yang kemudian dipasarkan di dalam dan luar negeri.

b. Budidaya Perikanan

Budidaya ikan air tawar, seperti ikan nila dan lele, juga berkembang pesat, terutama di daerah pedesaan yang memiliki sumber air tawar yang melimpah.

4. Peternakan

a. Sapi dan Kerbau

Peternakan sapi dan kerbau cukup dominan di wilayah pedesaan. Produk peternakan ini meliputi daging, susu, dan produk turunan lainnya yang dipasarkan baik secara lokal maupun regional.

b. Unggas dan Kambing

Selain sapi dan kerbau, peternakan unggas (ayam dan bebek) dan kambing juga berperan penting dalam perekonomian lokal, dengan produksi yang memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat serta pasar lokal.

5. Industri Pengolahan

a. Penggilingan Padi

Industri penggilingan padi menjadi bagian penting dari sektor pertanian, membantu petani dalam mengolah hasil panen menjadi produk siap jual.

b. Pengolahan Kelapa Sawit

Pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit mentah (CPO) menjadi salah satu industri utama di Bireuen. Pabrik-pabrik pengolahan sawit tersebar di beberapa kecamatan, memberikan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

c. Pengolahan Hasil Laut

Pengolahan hasil laut, termasuk pengeringan ikan, pengalengan, dan produk olahan lainnya, menjadi sektor industri yang berkontribusi pada ekonomi lokal dan ekspor.

6. Perdagangan dan Pasar

a. Pasar Tradisional

Pasar tradisional di Bireuen menjadi pusat kegiatan ekonomi harian, di mana penduduk lokal memperjualbelikan berbagai komoditas seperti hasil pertanian, perikanan, dan barang kebutuhan sehari-hari.

b. Pusat Perbelanjaan Modern

Selain pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern seperti swalayan dan toko-toko retail mulai tumbuh di kota-kota utama, memberikan alternatif belanja bagi masyarakat serta meningkatkan perekonomian lokal.

7. Sektor Jasa

a. Transportasi

Jasa transportasi memainkan peran penting, terutama karena Bireuen berada di jalur strategis lintas Sumatra. Transportasi darat, termasuk angkutan umum dan jasa pengiriman barang, sangat vital bagi mobilitas penduduk dan distribusi barang.

b. Penginapan dan Pariwisata

Sektor penginapan berkembang seiring dengan peningkatan wisatawan yang datang ke Bireuen, baik untuk tujuan bisnis maupun wisata. Hotel, penginapan, dan homestay mulai bermunculan di pusat kota dan dekat objek wisata.

8. Infrastruktur Ekonomi

a. Jaringan Jalan

Infrastruktur jalan di Kabupaten Bireuen cukup memadai, dengan jalan-jalan utama yang menghubungkan antar kecamatan dan kota lain di Aceh. Ini mendukung distribusi barang dan mobilitas penduduk.

b. Telekomunikasi dan Internet

Akses telekomunikasi dan internet yang semakin baik menjadi pendorong bagi ekonomi digital dan modernisasi sektor-sektor lain di Bireuen.

9. Investasi dan Pengembangan Ekonomi

a. Investasi Lokal dan Asing

Pemerintah Kabupaten Bireuen mendorong investasi di berbagai sektor, terutama pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan. Beberapa investasi asing juga masuk dalam sektor perkebunan kelapa sawit dan perikanan.

b. Pengembangan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi fokus dalam pengembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menyediakan berbagai program dukungan, seperti pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan bantuan teknis untuk meningkatkan daya saing UMKM.

10. Tantangan Ekonomi

a. Ketergantungan pada Sektor Pertanian

Ekonomi Bireuen masih sangat bergantung pada sektor pertanian, yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim. Diversifikasi ekonomi menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

b. Infrastruktur yang Belum Merata

Meskipun infrastruktur utama seperti jalan dan telekomunikasi cukup memadai, beberapa wilayah pedesaan masih kekurangan infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan, terutama dalam meningkatkan keterampilan teknis dan pendidikan formal untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang lebih kompetitif.

11. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah

a. Program Pemberdayaan Ekonomi

Pemerintah Kabupaten Bireuen menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti penyuluhan pertanian, pengembangan koperasi, dan fasilitasi akses ke pasar bagi petani dan pelaku UMKM.

b. Peningkatan Infrastruktur

Investasi pemerintah dalam infrastruktur terus berlanjut, termasuk peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Gambaran ekonomi Kabupaten Bireuen menunjukkan potensi besar di berbagai sektor, terutama pertanian, perikanan, dan industri pengolahan. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan dukungan infrastruktur yang terus berkembang, Bireuen memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor baru. Tantangan yang ada, seperti ketergantungan pada sektor pertanian dan kebutuhan peningkatan SDM, perlu diatasi dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ini akan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bireuen.

D. Potensi Daerah

Kabupaten Bireuen terletak di Provinsi Aceh, Indonesia, dan memiliki potensi ekonomi Daerah yang cukup beragam berkat kondisi geografis, sumber daya alam, serta budaya masyarakat setempat. Berikut adalah deskripsi lengkap dan detail mengenai potensi ekonomi Kabupaten Bireuen:

1. Pertanian

a. Komoditas Padi

Bireuen merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Aceh. Lahan sawah yang subur dan sistem irigasi yang memadai mendukung produksi padi yang tinggi. Hasil pertanian padi tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga dikirim ke daerah lain.

b. Perkebunan

Tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet juga berperan penting. Kelapa sawit khususnya, menjadi komoditas unggulan dengan lahan perkebunan yang terus berkembang.

c. Palawija dan Hortikultura

Selain padi, masyarakat Bireuen juga menanam palawija seperti jagung, kacang-kacangan, dan ubi-ubian, serta tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan.

2. Perikanan

a. Perikanan Laut

Bireuen memiliki garis pantai yang panjang di Samudera Hindia, menjadikannya potensial untuk perikanan laut. Ikan-ikan laut seperti tuna, cakalang, dan tongkol menjadi komoditas andalan.

b. Perikanan Darat

Budidaya ikan air tawar juga berkembang pesat, dengan tambak-tambak yang menghasilkan ikan nila, lele, gurame dan udang.

3. Peternakan

a. Sapi dan Kerbau

Peternakan sapi dan kerbau cukup berkembang, terutama di daerah pedesaan. Hewan ternak ini tidak hanya untuk kebutuhan lokal tetapi juga diperdagangkan ke luar daerah.

b. Ayam dan Kambing

Ternak ayam, baik pedaging maupun petelur, serta kambing juga menjadi bagian dari ekonomi peternakan yang mendukung kebutuhan protein hewani masyarakat setempat.

4. Industri dan Kerajinan

a. Industri Pengolahan

Industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, seperti pabrik penggilingan padi, pengolahan kelapa sawit, dan pengalengan ikan, menjadi salah satu sektor yang berkembang. Selain itu, ada industri kecil menengah yang bergerak di bidang makanan olahan, kerajinan tangan, dan tekstil.

b. Kerajinan Tradisional

Kerajinan anyaman, tenun, dan ukiran kayu yang dibuat oleh masyarakat Bireuen memiliki nilai seni yang tinggi dan pasar yang potensial, baik untuk wisatawan domestik maupun internasional.

5. Perdagangan dan Jasa

a. Pasar Tradisional dan Modern

Bireuen memiliki pasar-pasar tradisional yang menjadi pusat perdagangan lokal, serta beberapa pusat perbelanjaan modern yang mulai berkembang. Perdagangan produk pertanian, perkebunan, dan hasil laut menjadi tulang punggung ekonomi perdagangan.

b. Sektor Jasa

Jasa transportasi, penginapan, dan pariwisata mulai tumbuh, terutama karena Bireuen berada di jalur strategis lintas Sumatra yang menghubungkan Banda Aceh dengan Medan.

6. Pariwisata

a. Wisata Alam

Potensi wisata alam Bireuen meliputi pantai-pantai yang indah seperti Pantai Ujong Blang, serta pegunungan dan hutan yang menawarkan keindahan alam yang asri dan udara yang sejuk.

b. Wisata Budaya

Bireuen juga dikenal dengan kekayaan budaya Aceh, seperti tarian tradisional, seni musik, dan kuliner khas. Acara adat dan budaya yang rutin diadakan menarik minat wisatawan.

c. Wisata Religi

Sebagai daerah yang kaya dengan sejarah Islam, Bireuen memiliki sejumlah tempat religi yang sering dikunjungi oleh wisatawan spiritual, seperti masjid-masjid bersejarah.

7. Sumber Daya Alam

a. Mineral dan Batu Bara

Kabupaten Bireuen memiliki cadangan mineral yang bisa dieksplorasi, meskipun belum dieksploitasi secara besar-besaran. Potensi ini, jika dikembangkan dengan bijak, dapat menambah pendapatan daerah.

b. Kehutanan

Hutan di Bireuen menyediakan kayu dan hasil hutan lainnya, seperti damar dan rotan, yang bisa dimanfaatkan untuk industri lokal dan ekspor.

8. Infrastruktur dan Konektivitas

a. Jalur Transportasi

Bireuen terletak di jalur utama Banda Aceh-Medan, yang membuatnya strategis untuk pengembangan logistik dan perdagangan. Jalan raya yang baik dan akses ke pelabuhan di wilayah lain memudahkan distribusi barang.

b. Akses Teknologi

Infrastruktur telekomunikasi yang semakin baik juga mendukung perkembangan ekonomi, dengan akses internet dan teknologi yang mulai menjangkau area pedesaan.

9. Sumber Daya Manusia

a. Tenaga Kerja

Bireuen memiliki populasi dengan tenaga kerja yang mayoritas terampil di bidang pertanian, perikanan, dan perdagangan. Pendidikan vokasional dan pelatihan teknis dapat lebih dikembangkan untuk meningkatkan kualitas SDM.

b. Kewirausahaan

Masyarakat Bireuen dikenal ulet dan memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan, sektor UMKM di Bireuen dapat berkembang lebih pesat.

10. Dukungan Pemerintah

a. Program Pemberdayaan Ekonomi

Pemerintah daerah Bireuen aktif dalam program-program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan untuk petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil menengah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Pengembangan Infrastruktur

Investasi pemerintah dalam infrastruktur, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya, terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kabupaten Bireuen memiliki potensi ekonomi yang kuat di berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan perdagangan. Dengan pengelolaan yang baik, investasi yang tepat, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat, Bireuen bisa terus berkembang menjadi daerah dengan ekonomi yang dinamis dan berdaya saing tinggi.

BAB III

SUMBER DATA

Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2024 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Dalam salah satu klausulnya disebutkan bahwa data dan informasi kependudukan yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan bersumber dari data registrasi, non registrasi dan lintas sektoral.

a. Registrasi

Data registrasi penduduk merupakan data yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Registrasi kependudukan tersebut di administrasi ketika penduduk melakukan pencatatan status kependudukannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Non Registrasi

Data non registrasi merupakan data hasil rekapitulasi laporan kependudukan dari tingkat kecamatan dan pedesaan (data lahir, mati dan pindah datang)

c. Data lintas sektor

Data lintas sektor diperoleh dari sektor lain yang menangani bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan social, data yang dapat dipergunakan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan data kependudukan untuk pengambilan kebijakan maupun perencanaan pembangunan.

Elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan ini meliputi data yang berkaitan dengan variabel kuantitas dan kualitas penduduk serta variabel mobilitas penduduk. Variabel kuantitas penduduk merupakan jumlah penduduk dari selisih perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati dan pindah, datang. Sedangkan variabel kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak. Variabel Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

BAB IV

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

4.1 KUANTITAS PENDUDUK

Kuantitas penduduk adalah jumlah total penduduk di suatu wilayah, baik itu negara, provinsi, kota, maupun wilayah yang lebih kecil seperti kecamatan atau desa. Kuantitas penduduk dihitung berdasarkan jumlah kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Berikut kuantitas penduduk Kabupaten Bireuen yang bersumber dari data konsolidasi bersih semester II Tahun 2024 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

A. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Persoalan kependudukan merupakan persoalan yang berkaitan dengan persebaran penduduk, karena jumlahnya yang sangat besar dan pertumbuhan yang relatif masih tinggi. Persoalan ini tidak hanya terjadi pada tingkat nasional akan tetapi juga pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/Kota.

1. Jumlah Proporsi penduduk menurut jenis kelamin /Kecamatan

Salah satu permasalahan kependudukan pada umumnya adalah tidak meratanya distribusi penduduk antar wilayah kecamatan. Dengan kondisi ini, disatu pihak ada wilayah kecamatan yang sangat padat penduduknya, sementara dilain pihak ada wilayah kecamatan yang kepadatan penduduknya relatif rendah.

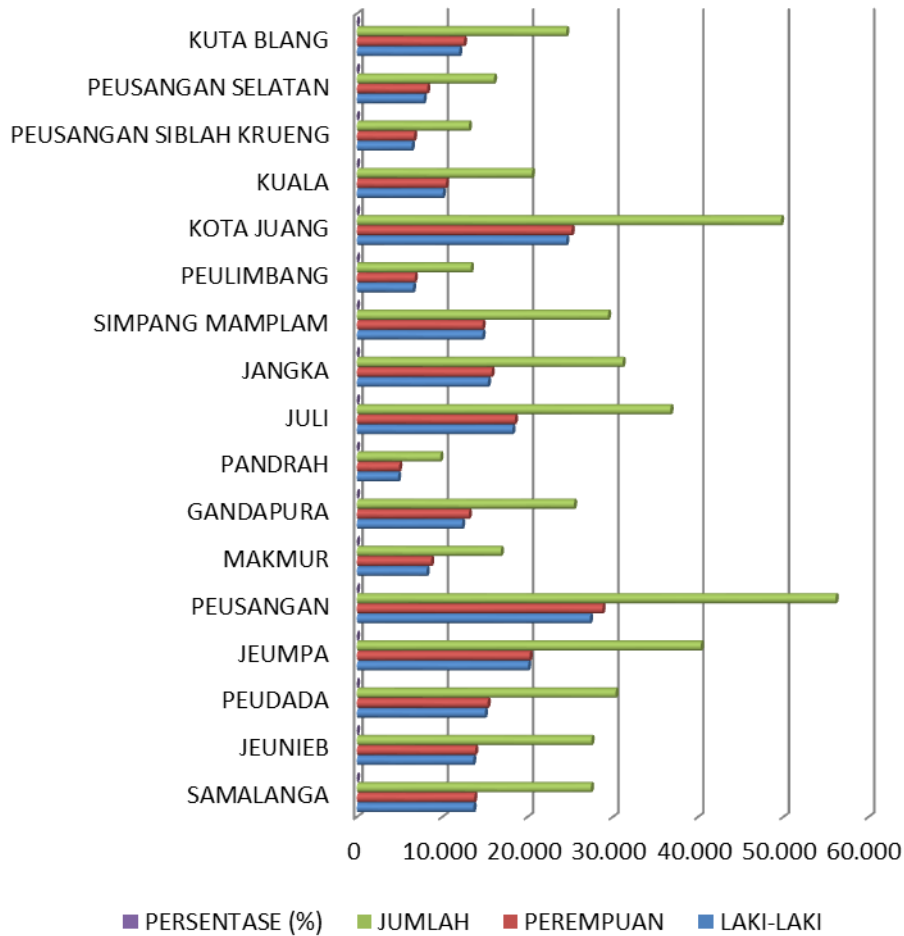
Kabupaten Bireuen dengan luas wilayah 1.797 km² didiami penduduk sebanyak 468.696 jiwa, terdiri dari 230.892 laki-laki dan 237.804 jiwa perempuan. Apabila dilihat dari persebaran penduduk di 17 (tujuh belas) kecamatan sepanjang tahun 2024, dapat dilihat bahwa distribusi jumlah penduduk pada tahun 2024, Kabupaten Bireuen yakni ini sebagian besar tinggal di Kecamatan Peusangan yakni 11,98 %, Kecamatan Kota Juang yakni 10,61 % Sedangkan Kecamatan dengan persentase penduduk terkecil adalah Kecamatan Pandrah yakni 2,09 %.

TABEL 4.1.
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN
KECAMATAN TAHUN 2024

KODE	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
11.11.01	SAMALANGA	13.674	13.776	27.450	5,86
11.11.02	JEUNIEB	13.635	13.874	27.509	5,87
11.11.03	PEUDADA	15.015	15.331	30.346	6,47
11.11.04	JEUMPA	20.080	20.255	40.335	8,61
11.11.05	PEUSANGAN	27.337	28.806	56.143	11,98
11.11.06	MAKMUR	8.176	8.707	16.883	3,60
11.11.07	GANDAPURA	12.338	13.129	25.467	5,43
11.11.08	PANDRAH	4.827	4.955	9.782	2,09
11.11.09	JULI	18.247	18.531	36.778	7,85
11.11.10	JANGKA	15.366	15.798	31.164	6,65
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	14.722	14.732	29.454	6,28
11.11.12	PEULIMBANG	6.582	6.781	13.363	2,85
11.11.13	KOTA JUANG	24.552	25.183	49.735	10,61
11.11.14	KUALA	10.077	10.446	20.523	4,38
11.11.15	PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	6.437	6.698	13.135	2,80
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	7.829	8.249	16.078	3,43
11.11.17	KUTA BLANG	11.998	12.553	24.551	5,24
	JUMLAH	230.892	237.804	468.696	100,00

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024.

GRAFIK PERBANDINGAN PENDUDUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN



Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024.

2. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Bireuen tergolong Kabupaten yang tidak begitu padat penduduknya Tabel 4.2 memperlihatkan kepadatan penduduk di Kabupaten Bireuen, dengan luas 190.121 km², Kabupaten Bireuen didiami oleh 468.696 Jiwa dengan kepadatan sebesar 261 jiwa/ km².

TABEL 4.2.
JUMLAH KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN BIREUEN
PER KECAMATAN TAHUN 2024

KODE	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH (Km ²)	TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/ Km ²)
11.11.01	SAMALANGA	27.450	141	195
11.11.02	JEUNIEB	27.509	112	246
11.11.03	PEUDADA	30.346	320	95
11.11.04	JEUMPA	40.335	109	370
11.11.05	PEUSANGAN	56.143	59	952
11.11.06	MAKMUR	16.883	72	234
11.11.07	GANDAPURA	25.467	39	653
11.11.08	PANDRAH	9.782	114	86
11.11.09	JULI	36.778	231	159
11.11.10	JANGKA	31.164	38	820
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	29.454	158	186
11.11.12	PEULIMBANG	13.363	118	113
11.11.13	KOTA JUANG	49.735	17	2926
11.11.14	KUALA	20.523	17	1207
11.11.15	PSG SIBLAH KRUENG	13.135	111	118
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	16.078	94	171
11.11.17	KUTA BLANG	24.551	47	522
JUMLAH		468.696	1.797	261

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024.

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto. Sedangkan laju pertumbuhan dengan menggunakan exponential dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 Pertumbuhan Penduduk angka pertambahan penduduk di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut

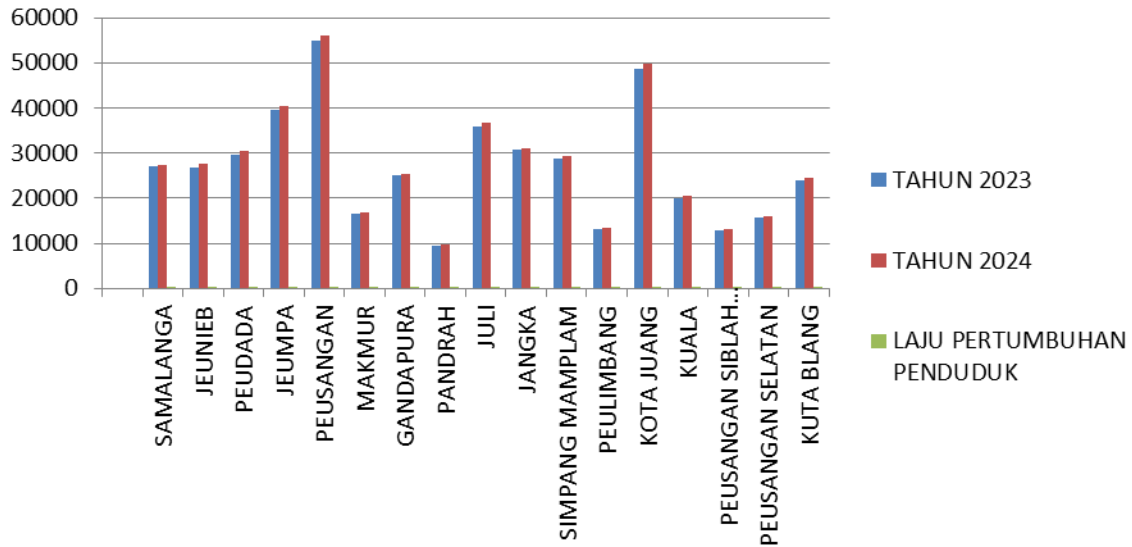
:

TABEL 4.3
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN BIREUEN
PER KECAMATAN TAHUN 2024

KODE	WILAYAH	TAHUN 2023	TAHUN 2024	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
11.11.01	SAMALANGA	27.010	27.450	1,63
11.11.02	JEUNIEB	26.875	27.509	2,36
11.11.03	PEUDADA	29.611	30.346	2,48
11.11.04	JEUMPA	39.541	40.335	2,01
11.11.05	PEUSANGAN	55.049	56.143	1,99
11.11.06	MAKMUR	16.504	16.883	2,30
11.11.07	GANDAPURA	25.094	25.467	1,49
11.11.08	PANDRAH	9.475	9.782	3,24
11.11.09	JULI	35.993	36.778	2,18
11.11.10	JANGKA	30.656	31.164	1,66
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	28.723	29.454	2,54
11.11.12	PEULIMBANG	13.163	13.363	1,52
11.11.13	KOTA JUANG	48.792	49.735	1,93
11.11.14	KUALA	20.076	20.523	2,23
11.11.15	PSG SIBLAH KRUENG	12.864	13.135	2,11
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	15.579	16.078	3,20
11.11.17	KUTA BLANG	23.973	24.551	2,41
JUMLAH		458.978	468.696	2,12

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024.

**GRAFIK LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
KABUPATEN BIREUEN**



B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

1. Jumlah dan proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

Dalam Pengetahuan tentang kependudukan dikenal istilah karakteristik penduduk yang berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku social ekonomi penduduk. Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia, sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain

a. **Rasio Jenis Kelamin**

TABEL 4.4.
RASIO JENIS KELAMIN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

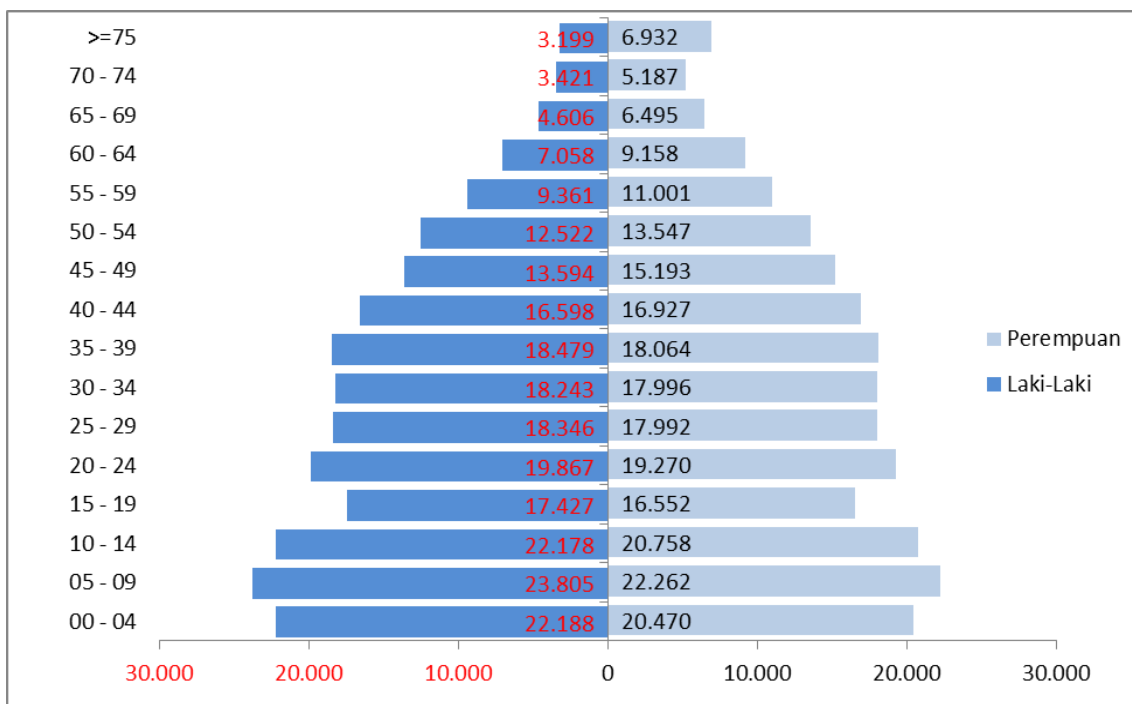
KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH PENDUDUK	RASIO JENIS KELAMIN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
00 - 04	22.188	20.470	42.658	108,39
05 - 09	23.805	22.262	46.067	106,93
10 - 14	22.178	20.758	42.936	106,84
15 - 19	17.427	16.552	33.979	105,29
20 - 24	19.867	19.270	39.137	103,10
25 - 29	18.346	17.992	36.338	101,97
30 - 34	18.243	17.996	36.239	101,37
35 - 39	18.479	18.064	36.543	102,30
40 - 44	16.598	16.927	33.525	98,06
45 - 49	13.594	15.193	28.787	89,48
50 - 54	12.522	13.547	26.069	92,43
55 - 59	9.361	11.001	20.362	85,09
60 - 64	7.058	9.158	16.216	77,07
65 - 69	4.606	6.495	11.101	70,92
70 - 74	3.421	5.187	8.608	65,95
>=75	3.199	6.932	10.131	46,15
JUMLAH	230.892	237.804	468.696	97,09

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024.

b. **Piramida Penduduk**

Kondisi penduduk di piramida ini mengalami pertumbuhan atau perkembangan yang sifatnya cepat. Angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematiannya. Kelompok umur yang semakin tua semakin turun atau sedikit jumlahnya. Karena hal itulah, pemerintah Kabupaten Bireuen harus mampu pula menciptakan pasar kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

GRAFIK 3.2
PIRAMIDA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2024



Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur lima tahunan. Piramida penduduk Kabupaten Bireuen menunjukkan struktur penduduk constrictive dengan struktur penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok umur di atasnya. Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolut tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.

Demikian pula jumlah penduduk pada kelompok umur 20-29 tahun menunjukkan jumlah yang paling besar. Diduga penduduk kelompok umur 20-29 tahun ini adalah kelompok yang lahir pada tahun 1984-1993 yang mulai memasuki usia tersebut ditambah dengan migran yang masuk ke Kabupaten Bireuen. Penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang masih kecil yaitu 5,90 persen. Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin

meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

Bila dikaitkan dengan umur median penduduk, maka penduduk Kabupaten Bireuen termasuk dalam kategori penduduk *intermediate*. Dimana umur median penduduk Kabupaten Bireuen tahun 2024 adalah 29 tahun, yang berarti setengah penduduk Kabupaten Bireuen pada tahun 2024 berusia di bawah 29 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 29 tahun, dengan kata lain, penduduk Kabupaten Bireuen dikategorikan sebagai penduduk *intermediate* yaitu transisi dari muda (*youngpopulation*) ke penduduk tua (*old population*).

c. **Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)**

Rasio Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Rasio Ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15–64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau penduduk yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dan semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

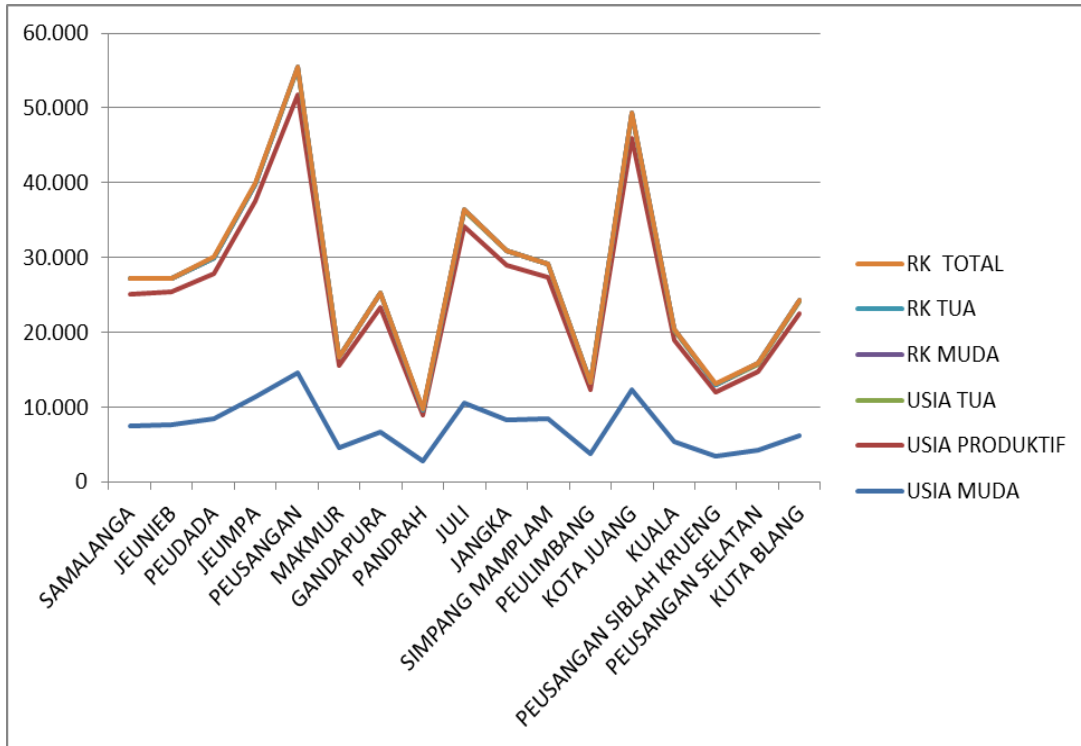
Tabel. 4.5

RASIO KETERGANTUNGAN

NO	KECAMATAN	USIA			RASIO KETERGANTUNGAN		RASIO KETERGANTUNGAN TOTAL
		MUDA	PRODUKTIF	TUA	MUDA	TUA	
1	SAMALANGA	7.414	17.694	2.041	41,90	11,53	53,44
2	JEUNIEB	7.702	17.660	1.768	43,61	10,01	53,62
3	PEUDADA	8.491	19.338	2.128	43,91	11,00	54,91
4	JEUMPA	11.343	26.153	2.300	43,37	8,79	52,17
5	PEUSANGAN	14.566	37.202	3.624	39,15	9,74	48,90
6	MAKMUR	4.568	10.943	1.127	41,74	10,30	52,04
7	GANDAPURA	6.741	16.617	1.825	40,57	10,98	51,55
8	PANDRAH	2.801	6.161	630	45,46	10,23	55,69
9	JULI	10.480	23.704	2.139	44,21	9,02	53,24
10	JANGKA	8.360	20.540	1.956	40,70	9,52	50,22
11	SP MAMPLAM	8.396	18.931	1.754	44,35	9,27	53,62
12	PEULIMBANG	3.809	8.594	827	44,32	9,62	53,94
13	KOTA JUANG	12.392	33.638	3.229	36,84	9,60	46,44
14	KUALA	5.328	13.678	1.308	38,95	9,56	48,52
15	PSG SIBLAH KRUENG	3.466	8.605	912	40,28	10,60	50,88
16	PSG SELATAN	4.303	10.379	1.080	41,46	10,41	51,86
17	KUTA BLANG	6.236	16.250	1.705	38,38	10,49	48,87

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024.

GRAFIK RASIO KETERGANTUNGAN



Apabila dilihat perkecamatan seperti pada tabel 4.5 maka rasio ketergantungan total tertinggi ada di Kecamatan Pandrah 55,69 dan Kecamatan peudada 54,91 dan Kecamatan Jeunieb sebesar 43,61 merupakan kecamatan dengan rasio ketergantungan penduduk muda tertinggi, sementara ratio ketergantungan penduduk tua tertinggi berada di Kecamatan Samalanga 11,53, dan Peudada 11,00. Sedangkan Kecamatan Kota Juang merupakan kecamatan dengan rasio ketergantungan Muda total terendah sebesar 36,84 dan rasio ketergantungan penduduk tua terendah yakni 8,79 di Kecamatan Jeumpa .

Tabel 4.6

**JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT STATUS KAWIN.
PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN DAN JENIS KELAMIN**

KODE	WILAYAH	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI	
		(LK)	(PR)	(LK)	(PR)	(LK)	(PR)	(LK)	(PR)
11.11.01	SAMALANGA	7.885	6.226	5.479	5.777	139	239	171	1.534
11.11.02	JEUNIEB	7.779	6.146	5.582	5.889	140	321	134	1.518
11.11.03	PEUDADA	8.552	6.893	6.104	6.425	164	318	195	1.695
11.11.04	JEUMPA	11.610	9.463	8.093	8.434	151	375	226	1.983
11.11.05	PEUSANGAN	15.775	13.620	10.967	11.446	274	538	321	3.202
11.11.06	MAKMUR	4.738	4.079	3.305	3.462	68	128	65	1.038
11.11.07	GANDAPURA	7.149	6.129	4.930	5.159	115	229	144	1.612
11.11.08	PANDRAH	2.765	2.200	1.971	2.061	42	111	49	583
11.11.09	JULI	10.414	8.758	7.431	7.724	187	342	215	1.707
11.11.10	JANGKA	9.200	7.603	5.865	6.166	124	228	177	1.801
11.11.11	SP.MAMPLAM	8.376	6.653	6.054	6.407	125	258	167	1.414
11.11.12	PEULIMBANG	3.758	3.117	2.695	2.837	60	128	69	699
11.11.13	KOTA JUANG	14.080	11.768	9.856	10.196	285	549	331	2.670
11.11.14	KUALA	5.690	4.892	4.154	4.302	105	211	128	1.041
11.11.15	PSG KRUENG	3.679	3.054	2.624	2.734	61	125	73	785
11.11.16	PSG.SELATAN	4.380	3.721	3.284	3.419	69	146	96	963
11.11.17	KUTA BLANG	6.837	5.865	4.892	5.046	108	197	161	1.445
JUMLAH		132.667	110.187	93.286	97.484	2.217	4.443	2.722	25.690

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024.

2. Jumlah dan Proporsi penduduk menurut status kawin

a. Angka Perkawinan Kasar

Angka perkawinan Kasar menunjukkan banyaknya perkawinan pada suatu periode tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan priode yang sama di suatu wilayah. Angka perkawinan kasar ini merupakan indikator perkawinan yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan usia dan jenis kelamin, tetapi bagidaerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan yang sangat sederhana tanpa pertimbangan usia dan jenis kelamin tetapi bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan jumlah penduduk menurut umur, maka

indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

TABEL 4.7
ANGKA PERKAWINAN KASAR MENURUT KECAMATAN
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

NO	WILAYAH	JMLH PERKAWINAN	JMLH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	ANGKA PERKAWINAN KASAR
1	SAMALANGA	100	27.149	3,68
2	JEUNIEB	109	27.130	4,02
3	PEUDADA	142	29.957	4,74
4	JEUMPA	133	39.796	3,34
5	PEUSANGAN	226	55.392	4,08
6	MAKMUR	49	16.638	2,95
7	GANDAPURA	102	25.183	4,05
8	PANDRAH	31	9.592	3,23
9	JULI	162	36.323	4,46
10	JANGKA	124	30.856	4,02
11	SIMPANG MAMPLAM	87	29.081	2,99
12	PEULIMBANG	60	13.230	4,54
13	KOTA JUANG	184	49.259	3,74
14	KUALA	59	20.314	2,90
15	PSG. SIBLAH KRUENG	58	12.983	4,47
16	PSG. SELATAN	54	15.762	3,43
17	KUTA BLANG	125	24.191	5,17
	JUMLAH	1.805	462.836	3,90

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024.

b. Angka Perkawinan Umum

Angka perkawinan Umum (AKU) menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu. Angka perkawinan umum lebih cermat dibandingkan dengan angka perkawinan kasar karena dalam perhitungannya ini hanya memasukan penduduk yang beresiko kawin saja yaitu yang berumur 15 tahun sebagai faktor penyebut. Sementara penduduk berusia di bawah 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai penyebut karena dianggap belum terpapar terhadap peristiwa perkawinan. Angka perkawinan umum di Kabupaten Bireuen tertera pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.8
ANGKA PERKAWINAN UMUM DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2024

NO	WILAYAH	JUMLAH PERKAWINAN	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN USIA >= 15THN	ANGKA PERKAWINAN UMUM
1	SAMALANGA	100	19.695	5,08
2	JEUNIEB	109	19.408	5,62
3	PEUDADA	142	21.509	6,60
4	JEUMPA	133	28.529	4,66
5	PEUSANGAN	226	41.022	5,51
6	MAKMUR	49	12.085	4,05
7	GANDAPURA	102	18.467	5,52
8	PANDRAH	31	6.839	4,53
9	JULI	162	25.888	6,26
10	JANGKA	124	22.465	5,52
11	SIMPANG MAMPLAM	87	20.738	4,20
12	PEULIMBANG	60	9.391	6,39
13	KOTA JUANG	184	36.944	4,98
14	KUALA	59	14.999	3,93
15	PSG. SIBLAH KRUENG	58	9.513	6,10
16	PSG. SELATAN	54	11.537	4,68
17	KUTA BLANG	125	18.006	6,94
JUMLAH		1.805	337.035	5,36

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024.

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, Umur Perkawinan Pertama, lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi.

c. Angka Perkawinan menurut kelompok Umur

TABEL 4.9
ANGKA PERKAWINAN MENURUT KELOMPOK UMUR
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

N O	KELOMPOK UMUR	JUMLAH PERKAWINAN	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	JUMLAH PDDK USIA >=15THN	ANGKA PERKAWINAN KASAR	ANGKA PERKAWINAN UMUM
1	00-04	0	43.005	-	0	0
2	05-09	0	45.262	-	0	0
3	10-14	0	42.745	-	0	0
4	15-19	38	31.466	33.979	1,21	1,12
5	20-24	483	39.429	39.137	12,25	12,34
6	25-29	686	35.975	36.338	19,07	18,88
7	30-34	300	36.782	36.239	8,16	8,28
8	35-39	116	36.349	36.543	3,19	3,17
9	40-44	72	33.229	33.525	2,17	2,15
10	45-49	36	28.533	28.787	1,26	1,25
11	50-54	31	25.757	26.069	1,2	1,19
12	55-59	19	19.932	20.362	0,95	0,93
13	60-64	12	15.626	16.216	0,77	0,74
14	65-69	5	10.763	11.101	0,46	0,45
15	70-74	4	8.198	8.608	0,49	0,46
16	75+	3	9.785	10.131	0,31	0,3
JUMLAH		1.805	462.836	337.035	3,90	5,36

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024.

d. **Rata-Rata Umur Kawin Pertama (Singulate Mean Age at Marriage-SMAM)**

Umur kawin pertama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas. Umur kawin pertama mempunyai korelasi negatif dengan tingkat fertilitas seorang perempuan, artinya semakin tua umur kawin pertama perempuan, maka semakin kecil potensi perempuan tersebut untuk melahirkan banyak anak. Hal ini terjadi karena semakin tinggi umur kawin pertama seorang perempuan, maka semakin pendek masa usia subur dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat fertilitas perempuan tersebut.

Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seseorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidaksiapan orang tua untuk pengasuhan anak serta kurang matangnya perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga.

TABEL 4.10
RATA- RATA UMUR KAWIN PERTAMA
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

KODE	WILAYAH	RATA-RATA USIA KAWIN PERTAMA	
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI
11.11	BIREUEN	25	31
11.11.01	SAMALANGA	25	32
11.11.02	JEUNIEB	25	31
11.11.03	PEUDADA	25	30
11.11.04	JEUMPA	25	31
11.11.05	PEUSANGAN	26	31
11.11.06	MAKMUR	25	30
11.11.07	GANDAPURA	26	31
11.11.08	PANDRAH	24	30
11.11.09	JULI	25	30
11.11.10	JANGKA	25	31
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	25	31
11.11.12	PEULIMBANG	24	31
11.11.13	KOTA JUANG	27	31
11.11.14	KUALA	26	31
11.11.15	PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	26	31
11.11.17	KUTA BLANG	25	31

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024.

Rata-rata umur kawin pertama penduduk perempuan di Kabupaten Bireuen tahun 2024 adalah 25 tahun sedangkan umur kawin pertama penduduk Laki-laki lebih tinggi dari perempuan yaitu 31 tahun (angka ini dihitung menggunakan data SIAK), angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kawin pertama penduduk perempuan Provinsi Aceh yakni 22,8 tahun dan rata-rata kawin pertama penduduk perempuan nasional yang mencapai 33,1 tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk perempuan di Kabupaten Bireuen telah menunda umur kawin pertama mereka, karena diduga mereka lebih banyak mengikuti pendidikan dan terjun ke pasar kerja.

e. Angka Perceraian Kasar

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai

terutama bagi perempuan, angka perceraian kasar menunjukkan jumlah perceraian per 1.000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Angka ini berguna untuk mengetahui gambaran sosiologis suatu daerah yang berkaitan dengan tingkat perceraian.

Angka perceraian kasar ini merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan perceraian serta jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

TABEL 4.11
ANGKA PERCERAIAN KASAR DI KAB. BIREUEN TAHUN 2024

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH PERCERAIAN	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	ANGKA PERCERAIAN KASAR
1	00-04	0	43.005	0
2	05-09	0	45.262	0
3	10-14	0	42.745	0
4	15-19	2	31.466	0,06
5	20-24	16	39.429	0,41
6	25-29	81	35.975	2,25
7	30-34	126	36.782	3,43
8	35-39	164	36.349	4,51
9	40-44	192	33.229	5,78
10	45-49	186	28.533	6,52
11	50-54	180	25.757	6,99
12	55-59	132	19.932	6,62
13	60-64	98	15.626	6,27
14	65-69	81	10.763	7,53
15	70-74	49	8.198	5,98
16	75+	39	9.785	3,99
JUMLAH		1.346	462.836	2,91

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024.

f. Angka Perceraian Umum

Angka perceraian umum menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu. Angka perceraian umum lebih cermat dibandingkan dengan angka perceraian kasar.

Faktor penyebab perceraian antara lain adalah Ketidak harmonisan dalam rumah tangga, Krisis moral dan akhlak, perzinaan, pernikahan tanpa cinta dan adanya masalah-masalah dalam perkawinan.

TABEL 4.12
ANGKA PERCERAIAN UMUM
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH PERCERAIAN	JUMLAH PENDUDUK USIA >=15THN PERTENGAHAN TAHUN	ANGKA PERCERAIAN UMUM
1	00-04	0	0	0
2	05-09	0	0	0
3	10-14	0	0	0
4	15-19	2	33.979	0,06
5	20-24	16	39.137	0,41
6	25-29	81	36.338	2,23
7	30-34	126	36.239	3,48
8	35-39	164	36.543	4,49
9	40-44	192	33.525	5,73
10	45-49	186	28.787	6,46
11	50-54	180	26.069	6,9
12	55-59	132	20.362	6,48
13	60-64	98	16.216	6,04
14	65-69	81	11.101	7,3
15	70-74	49	8.608	5,69
16	75+	39	10.131	3,85
JUMLAH		1.346	337.035	3,99

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

3. Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri Kepala Keluarga dan Keluarga yang terdiri dari ayah, Ibu dan Anak . Juga Keluarga adalah Unit terkecil dari masyarakat dimana Kepala Keluarga dan beberapa orang hidup bersama di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung. Data keluarga menjadi penting untuk menyusun berbagai program pembangunan seperti peningkatan ekonomi, penghasilan dan penanganan kemiskinan dan lain

sebagainya. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat merupakan tempat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik, pembentukan karakter dan pengembangan intelektual. Oleh sebab itu perencanaan keluarga menjadi penting, tidak hanya jumlah anggota keluarga tetapi juga kualitasnya.

a. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti/batih (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Kepala keluarga adalah anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari keluarga, serta dianggap sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga tersebut. Dalam banyak kasus, kepala keluarga merujuk pada ayah atau suami, tetapi dalam situasi tertentu, peran ini bisa diemban oleh perempuan, seperti dalam keluarga yang dipimpin oleh janda atau perempuan yang menjadi pencari nafkah utama.

Pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa rata – rata kepala keluarga di kabupaten Bireuen Tahun 2024 adalah 3,29 atau berkisar 3 orang kepala keluarga yang merupakan Kepala Keluarga inti.

TABEL 4.13
JUMLAH KELUARGA DAN RATA-RATA
JUMLAH ANGGOTA KELUARGA

KODE	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KELUARGA	RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
11.11.01	SAMALANGA	27.450	8.500	3,23
11.11.02	JEUNIEB	27.509	8.508	3,23
11.11.03	PEUDADA	30.346	9.348	3,25
11.11.04	JEUMPA	40.335	11.896	3,39
11.11.05	PEUSANGAN	56.143	17.061	3,29
11.11.06	MAKMUR	16.883	5.099	3,31
11.11.07	GANDAPURA	25.467	7.852	3,24
11.11.08	PANDRAH	9.782	3.013	3,25
11.11.09	JULI	36.778	10.791	3,41
11.11.10	JANGKA	31.164	9.285	3,36
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	29.454	8.969	3,28
11.11.12	PEULIMBANG	13.363	4.026	3,32
11.11.13	KOTA JUANG	49.735	15.078	3,30
11.11.14	KUALA	20.523	6.221	3,30
11.11.15	PSG SIBLAH KRUENG	13.135	4.063	3,23
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	16.078	5.040	3,19
11.11.17	KUTA BLANG	24.551	7.505	3,27
BIREUEN		468.696	142.255	3,29

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Kabupaten Bireuen dan dapat digunakan pemerintah Kabupaten dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang beranggota 3-4 orang.

b. Hubungan dengan Kepala Keluarga

Status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak.

Tabel 4.14
STATUS HUBUNGAN DENGAN KEPALA KELUARGA
DI KABUPATEN BIREUEN

NO	STATUS HUBUNGAN DENGAN KEPALA KELUARGA	JUMLAH PENDUDUK (n) JIWA					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	KEPALA KELUARGA	101.704	21,70	40.551	8,65	142.255	30,35
2	SUAMI	1	0,00	0	0,00	1	0,00
3	ISTERI	0	0,00	89.699	19,14	89.699	19,14
4	ANAK	125.598	26,80	103.923	22,17	229.521	48,97
5	MENANTU	2	0,00	2	0,00	4	0,00
6	CUCU	1.329	0,28	1.084	0,23	2.413	0,51
7	ORANG TUA	13	0,00	156	0,03	169	0,04
8	MERTUA	8	0,00	120	0,03	128	0,03
9	FAMILI LAIN	1.925	0,41	1.967	0,42	3.892	0,83
10	PEMBANTU	0	0,00	1	0,00	1	0,00
11	LAINNYA	312	0,07	301	0,06	613	0,13
JUMLAH		230.892	49	237.804	51	468.696	100

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

Dari tabel diatas bahwa kepala keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/isteri yaitu dari 101.704 kepala keluarga laki-laki (21,70%) yang mempunyai isteri sebanyak 89,699 orang (19,14%), sedangkan kepala keluarga perempuan 40.551 orang (8,65%). Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan pada umumnya berstatus sendiri baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati. Perempuan berstatus kepala keluarga ini perlu mendapat perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki.

c. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur dan status Perkawinan diketahui, berkaitan dengan perencanaan kebijakan pelayanan kebutuhan dasar berbasis keluarga seperti ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Tabel 4.15
KARAKTERISTIK KEPALA KELUARGA BERDASARKAN UMUR
DI KABUPATEN BIREUEN

KELOMPOK UMUR	JUMLAH KEPALA KELUARGA					
	LAKI- LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
15-19	53	0,04	65	0,05	118	0,08
20-24	944	0,66	386	0,27	1.330	0,94
25-29	5.837	4,10	756	0,53	6.593	4,64
30-34	12.243	8,61	1.223	0,86	13.466	9,47
35-39	15.321	10,77	1.908	1,34	17.229	12,11
40-44	15.002	10,55	2.692	1,89	17.694	12,44
45-49	12.790	8,99	3.617	2,54	16.407	11,54
50-54	12.134	8,53	4.546	3,20	16.680	11,73
55-59	9.222	6,48	4.965	3,49	14.187	9,98
60-64	6.997	4,92	5.364	3,77	12.361	8,69
65-69	4.579	3,22	4.588	3,23	9.167	6,45
70-74	3.407	2,40	4.219	2,97	7.626	5,36
> 75	3.157	2,22	6.199	4,36	9.356	6,58
TOTAL	101.686	71,50	40.528	28,50	142.214	100,00

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

Dari tabel 4.15 Terlihat bahwa kepala keluarga yang berstatus kawin tertinggi berada pada kelompok umur 35-39 tahun sebesar tersebut terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Kabupaten Bireuen adalah laki-laki yaitu 15.321 orang atau 10.77 %. Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga, namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai atau sebab-sebab yang lain.

Apabila dikaitkan dengan jenis kelamin, tabel 4.15 juga menunjukkan bahwa mayoritas Kepala Keluarga laki-laki berada di kelompok umur 35-59 tahun, sedangkan proporsi Kepala Keluarga perempuan tertinggi berada di kelompok umur ≥ 75 tahun.

Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bireuen merupakan keluarga yang berada pada kelompok produktif hal ini menjadi salah satu sumber kekuatan pembangunan ekonomi, semakin banyaknya kelompok produktif berpotensi meningkatkan pendapatan dan daya saing.

d. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin ini dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan

dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan. Selain itu, penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern yakni perempuan yang hidup melajang.

Dalam administrasi kependudukan, perempuan berstatus kawin yang menjadi kepala keluarga juga diberikan kepada mereka yang berstatus istri kedua, ketiga maupun keempat. Oleh sebab itu persentase perempuan kepala keluarga sebesar 40,551 Orang diduga termasuk mereka yang menjadi kepala keluarga ini adalah menjadi isteri kedua, ketiga, dan seterusnya. Lebih menarik jika status kawin kepala keluarga dikaitkan dengan kelompok umur.

Tabel 4.16
KARAKTERISTIK KEPALA KELUARGA BERDASARKAN
JENIS KELAMIN DI KABUPATEN BIREUEN

KODE	WILAYAH	KEPALA KELUARGA		JUMLAH KEPALA KELUARGA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
11.11.01	SAMALANGA	6.000	2.500	8.500
11.11.02	JEUNIEB	6.009	2.499	8.508
11.11.03	PEUDADA	6.668	2.680	9.348
11.11.04	JEUMPA	8.741	3.155	11.896
11.11.05	PEUSANGAN	12.025	5.036	17.061
11.11.06	MAKMUR	3.553	1.546	5.099
11.11.07	GANDAPURA	5.375	2.477	7.852
11.11.08	PANDRAH	2.119	894	3.013
11.11.09	JULI	8.081	2.710	10.791
11.11.10	JANGKA	6.437	2.848	9.285
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	6.566	2.403	8.969
11.11.12	PEULIMBANG	2.910	1.116	4.026
11.11.13	KOTA JUANG	10.906	4.172	15.078
11.11.14	KUALA	4.535	1.686	6.221
11.11.15	PSG SIBLAH KRUENG	2.864	1.199	4.063
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	3.552	1.488	5.040
11.11.17	KUTA BLANG	5.363	2.142	7.505
	TOTAL	101.704	40.551	142.255

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

e. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Kawin

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai, baik hidup maupun mati. Kebiasaan kawin ulang yang cepat dilakukan oleh laki-laki, menyebabkan perbedaan persentase tersebut. Selain itu, perempuan yang berstatus cerai baik hidup maupun

mati, mempunyai pertimbangan untuk melakukan kawin ulang terutama apabila mereka telah memiliki anak-anak yang biasanya menjadi tanggung jawab perempuan. Meskipun pada saat ini kecenderungan tersebut sudah mulai menurun tetapi kondisi ini masih terjadi. Faktor yang lain adalah mereka yang cerai mati, terjadi pada kelompok umur yang lebih tua, yang menyebabkan perempuan enggan untuk menikah kembali.

TABEL 4.17
KARAKTERISTIK KEPALA KELUARGA BERDASARKAN
STATUS KAWIN DI KABUPATEN BIREUEN

NO	STATUS PERKAWINAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA				JUMLAH	
		LAKI-LAKI n (JIWA)	%	PEREMPUAN n (JIWA)	%	n (JIWA)	%
1	BELUM KAWIN	3.762	2,64	3.754	2,64	7.516	5,28
2	KAWIN	93.086	65,44	7.063	4,97	100.149	70,40
3	CERAI HIDUP	2.157	1,52	4.340	3,05	6.497	4,57
4	CERAI MATI	2.699	1,90	25.394	17,85	28.093	19,75
JUMLAH		101.704	71,5	40.551	28,51	142.255	100

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

f. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan

Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah status kepala keluarga dikaitkan dengan pendidikan yang dicapai, karena pendidikan yang dicapai kepala keluarga merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia. Indikator ini dapat digunakan untuk yang menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan seseorang maupun anggota keluarganya. Jenjang pendidikan yang dicapai kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kasar kualitas sosial maupun ekonomi dari rumah tangga/keluarga yang bersangkutan.

Tabel 4.18
KARAKTERISTIK KEPALA KELUARGA BERDASARKAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN BIREUEN

NO	PENDIDIKAN	KEPALA KELUARGA					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	1.059	0,74	1.353	0,95	2412	1,70
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	1.045	0,73	1.051	0,74	2096	1,47
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	26.391	18,55	19.108	13,43	45.499	31,98
4	SLTP/SEDERAJA	22.826	16,05	7.426	5,22	30.252	21,27
5	SLTA/SEDERAJAT	40.282	28,32	8.142	5,72	48.424	34,04
6	DIPLOMA I/II	814	0,57	668	0,47	1.482	1,04
7	AKADEMI/D.III/S. MUDA	1946	1,37	748	0,53	2.694	1,89
8	DIPLOMA IV/STRATA I	6.847	4,81	1.990	1,40	8.837	6,21
9	STRATA-II	458	0,32	52	0,04	510	0,36
10	STRATA-III	36	0,03	13	0,01	49	0,03
JUMLAH		101.704	71	40.551	29	142.255	100

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

Pada tabel diatas terlihat kualitas kepala keluarga Kabupaten Bireuen menurut tingkat pendidikan formal yang ditamatkan pada tahun 2024 relatif rendah. Sebagian besar kepala keluarga baru menamatkan sekolah SLTA (28,32%) dan tamat SD (18,55%), sedangkan tidak/belum sekolah 0,74 % persen dan belum tamat SD 0,73% persen. Kepala keluarga yang tamat SD/ sederajat lebih banyak dimiliki oleh Perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Demikian juga kepala keluarga yang tidak/belum sekolah maupun belum tamat SD/ sederajat lebih banyak didominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki.

Dugaan keluarga yang dikepalai perempuan akan mempunyai status ekonomi yang lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai laki-laki mendekati kenyataan.

Selain itu, kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja disektor informal.

Melihat kondisi pendidikan kepala keluarga di atas, maka pemerintah Kabupaten Bireuen harus memberikan perhatian serius. Karena proses globalisasi yang sedang berlangsung, maka pemerintah Kabupaten Bireuen perlu meningkatkan pendidikan penduduknya agar mempunyai daya saing global.

g. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Tabel 4.19
KARAKTERISTIK KEPALA KELUARGA BERDASARKAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN BIREUEN

STATUS BEKERJA	KEPALA KELUARGA				JUMLAH	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n (Jiwa)	%
	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%		
BEKERJA	98.978	97,32	14.964	36,92	113.942	80,11
BELUM/TIDAK BEKERJA	545	0,54	1.112	2,74	1.657	1,16
MENGURUS RUMAH TANGGA	7	0,01	22.974	56,68	22.981	16,16
PELAJAR/MAHASISWA	1.182	1,16	674	1,66	1.856	1,30
PENSIUNAN	992	0,98	809	2,00	1.801	1,27
JUMLAH	101.704	100,00	40.533	100,00	142.237	100,00

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

Tabel.4.19 di atas menunjukkan 80,11 persen kepala keluarga di Kabupaten Bireuen berstatus bekerja. Jika dilihat menurut jenis kelamin, proporsi kepala keluarga laki-laki yang bekerja (97,32%) , dibandingkan kepala keluarga perempuan (36,96%). Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga, sehingga lebih banyak yang harus terjun ke pasar kerja, sementara perempuan biasanya hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya keluarga yang bersangkutan. Meskipun demikian, perempuan pada masa kini mulai ikut terjun ke pasar kerja.

4. Penduduk menurut Karakteristik Sosial

a. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan ketrampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja ketrampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar, tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang.

Tabel 4.20
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BIREUEN

NO	PENDIDIKAN	KEPALA KELUARGA					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	1059	0,74	1353	0,95	2412	1,70
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	1.045	0,73	1051	0,74	2.096	1,47
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	26.391	18,55	19.108	13,43	45.499	31,98
4	SLTP/SEDERAJA	22.826	16,05	7.426	5,22	30.252	21,27
5	SLTA/SEDERAJAT	40.282	28,32	8.142	5,72	48.424	34,04
6	DIPLOMA I/II	814	0,57	668	0,47	1.482	1,04
7	AKADEMI/DIPLIII/S. MUDA	1.946	1,37	748	0,53	2.694	1,89
8	DIPLOMA IV/STRATA I	6.847	4,81	1.990	1,40	8.837	6,21
9	STRATA-II	458	0,32	52	0,04	510	0,36
10	STRATA-III	36	0,03	13	0,01	49	0,03
JUMLAH		101.704	71	40.551	29	142.255	100

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

Jumlah dan Proporsi penduduk Kabupaten Bireuen menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan ditunjukkan pada table diatas terlihat bahwa kualitas penduduk Kabupaten Bireuen menurut tingkat pendidikan formalnya sampai dengan tahun 2024 relatif baik. Jumlah penduduk Kabupaten Bireuen yang belum tamat SD hanya 1,47%. Penduduk yang tamat SLTP sebesar 21,27 % dan SLTA mencapai 34,04%.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, proporsi penduduk yang tamat SD untuk penduduk laki-laki sedikit lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan. Sedangkan untuk jenjang SLTP lebih besar perempuan dibandingkan Laki-laki.

b. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.

Pendidikan tertinggi yang di tamatkan merupakan menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri atau swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian akhir dan lulus dianggap tamat sekolah. Berikut seperti data

TABEL 4.21
JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI KAB. BIREUEN MENURUT PENDIDIKAN

NO	WILAYAH	TIDAK/ BLM SEKOL AH	BELUM TAMAT SD/ SEDERAJ AT	TAMAT SD/ SEDERAJ AT	SLTP/ SEDERAJ AT	SLTA/ SEDERAJ AT	D I/II	AKADE MI/D III/S. MUDA	D IV/ STRAT A I	STRAT A II	STRAT A III
1	SAMALANGA	3.254	1.519	2.175	2.331	3.758	53	113	451	18	2
2	SP. MAMPLAM	3.432	1.744	3.199	2.527	3.424	41	86	259	8	2
3	PANDRAH	1.192	585	925	846	1.143		25	85	7	2
4	JEUNIEB	3.374	1.695	2.584	2.533	3.111	46	69	220	3	-
5	PEULIMBANG	1.559	778	1.345	1.295	1.458	16	40	88	3	-
6	PEUDADA	3.408	1.829	3.110	2.779	3.368	54	84	371	9	3
7	JEUMPA	4.614	2.452	4.419	3.398	4.596	38	109	427	27	-
8	KOTA JUANG	5.156	2.741	2.982	3.574	7.778	96	480	1.591	143	11
9	JULI	4.573	2.015	3.710	2.809	4.310	53	155	579	40	3
10	JANGKA	3.646	1.738	3.044	2.649	3.782	47	97	344	16	3
11	PEUSANGAN	5.958	3.085	4.295	4.289	7.706	137	386	1.360	115	6
12	PSG SIBLAH KRUENG	1.450	711	1.158	1.147	1.708	17	38	194	12	2
13	PSG SELATAN	1.830	927	1.758	1.321	1.725	24	62	178	4	-
14	KUALA	2.228	1.085	1.806	1.651	2.782	32	120	356	17	-
15	MAKMUR	2.015	958	1.555	1.532	1.841	35	51	183	5	1
16	GANDAPURA	2.787	1.428	1.976	2.076	3.298	71	131	549	20	2
17	KUTA BLANG	2.545	1.342	1.801	1.983	3.417	96	154	632	28	-
JUMLAH		53.021	26.632	41.842	38.740	59.205	856	2.200	7.867	475	37

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

TABEL 4.22

JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN KAB. BIREUEN MENURUT PENDIDIKAN

NO	WILAYAH	TIDAK/BLM SEKOLAH	BLM TMT SD/SED ERAJAT	TAMAT SD/ SEDERAJ AT	SLTP/SED ERAJAT	SLTA/SE DERAJAT	D I/II	AKADEMI /D III/S. MUDA	D IV/ S-I	S-II	S-III
1	SAMALANGA	3.049	1.301	2.514	2.408	3.085	209	320	871	15	4
2	SP. MAMPLAM	3.436	1.616	3.647	2.437	2.729	110	182	566	7	2
3	PANDRAH	1.181	537	1.160	890	960	25	49	150	2	1
4	JEUNIEB	3.300	1.556	3.227	2.793	2.386	72	168	367	3	2
5	PEULIMBANG	1.560	751	1.656	1.405	1.158	35	51	161	2	2
6	PEUDADA	3.184	1.645	3.841	2.759	2.854	142	206	690	9	1
7	JEUMPA	4.424	2.234	4.916	3.399	4.087	115	318	743	14	5
8	KOTA JUANG	4.853	2.510	3.506	3.643	6.641	344	1.039	2.549	97	1
9	JULI	4.198	1.944	3.969	2.801	3.811	210	492	1.089	17	-
10	JANGKA	3.390	1.588	3.308	2.606	3.497	189	327	881	9	3
11	PEUSANGAN	5.542	3.006	4.791	4.306	7.005	432	961	2.671	89	3
12	PSG SIBLAH KRUENG	1.358	653	1.331	1.106	1.568	66	119	494	3	-
13	PEUSANGAN SELATAN	1.736	937	1.940	1.392	1.684	57	121	371	9	2
14	KUALA	2.065	1.096	2.056	1.590	2.574	129	288	634	13	1
15	MAKMUR	1.994	952	1.872	1.723	1.545	66	99	453	3	-
16	GANDAPURA	2.597	1.299	2.401	2.200	2.959	205	339	1.100	28	1
17	KUTA BLANG	2.367	1.278	2.046	1.997	2.966	207	392	1.263	31	6
JUMLAH		50.234	24.903	48.181	39.455	51.509	2.613	5.471	15.053	351	34

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

c. Jumlah penduduk menurut Agama

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”. Informasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk perencanaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

**TABEL 4.23
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA**

N O	AGAMA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (JIWA)	%	n (JIWA)	%	n (JIWA)	%
1	ISLAM	230.666	99,90	237.558	99,90	468.224	99,90
2	KRISTEN	72	0,03	85	0,04	157	0,03
3	KATHOLIK	10	0,00	9	0,00	19	0,00
4	HINDU	4	0,00	5	0,00	9	0,00
5	BUDHA	140	0,06	147	0,06	287	0,06
6	KHONGHUCU	-	0,00	-	-	-	-
7	KEPERCAYAA N	-	0,00	-	-	-	-
JUMLAH		230.892	100	237.804	100	468.696	100

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024.

Pada tabel diatas mayoritas penduduk Kabupaten Bireuen memeluk agama Islam (99,90%), disusul kemudian pemeluk agama Budha (0,6%) dan yang memeluk agama Kristen hanya (0,3 %) . Sedangkan persentase agama Hindu, Katholik, dan Konghucu sangat kecil yakni 0,0 persen.

d. Jumlah Penduduk menurut Kecacatan.

Bagian ini menyajikan banyaknya penduduk penyandang cacat berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bireuen. Jika dirinci menurut jenis kecatatannya, jenis kecacatan terbesar adalah cacat mental / jiwa sebanyak 844 jiwa (43,60%) dan jenis kecacatan yang paling kecil pada jenis cacat fisik dan mental 82 jiwa (4,24%).

TABEL 4.24
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECACATAN

NO	DISABILITAS	JUMLAH PENDUDUK					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (JIWA)	%	n (JIWA)	%	n (JIWA)	%
1	DISABILITAS FISIK	188	16,65	125	15,49	313	16,17
2	DISABILITAS NETRA/BUTA	65	5,76	51	6,32	116	5,99
3	DISABILITAS RUNGU/WICARA	140	12,40	140	17,35	280	14,46
4	DISABILITAS MENTAL/JIWA	549	48,63	295	36,56	844	43,60
5	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	44	3,90	38	4,71	82	4,24
6	DISABILITAS LAINNYA	143	12,67	158	19,58	301	15,55
JUMLAH		1.129	100	100,00	100	100,00	100

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

5. KELAHIRAN

Banyaknya kelahiran membawa konsekwensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhankesempatan kerja.

Tingkat kelahiran di masa lalu akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran di masa kini, sehingga pengetahuan tentang fertilitas beserta indikator-indikatornya, termasuk Keluarga Berencana sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencana dalam menyusun Program-program pembangunan sosial terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu, anak dan pembangunan keluarga.

a. Angka Kelahiran Umum

Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate/GFR) Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate) adalah angka yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir dari setiap 1000 wanita pada usia reproduksi atau melahirkan yaitu pada kelompok usia 15-49 tahun 2024 menunjukkan angka kelahiran umum Kabupaten Bireuen yaitu sebesar 54,40 atau dapat diartikan tiap 1000 perempuan usia subur (15-49 tahun) penduduk Kabupaten Bireuen terjadi 54-55 kelahiran.

TABEL 4.25
JUMLAH ANGKA KELAHIRAN UMUM

KODE	WILAYAH	JUMLAH KELAHIRAN	JUMLAH PEREMPUAN USIA 15 - 49 TAHUN	ANGKA KELAHIRAN UMUM (GFR)
11.11.01	SAMALANGA	346	6.860	50,44
11.11.02	JEUNIEB	428	7.064	60,59
11.11.03	PEUDADA	437	7.862	55,58
11.11.04	JEUMPA	599	10.568	56,68
11.11.05	PEUSANGAN	760	14.862	51,14
11.11.06	MAKMUR	274	4.355	62,92
11.11.07	GANDAPURA	354	6.544	54,1
11.11.08	PANDRAH	152	2.458	61,84
11.11.09	JULI	607	9.716	62,47
11.11.10	JANGKA	438	8.130	53,87
11.11.11	SP MAMPLAM	365	7.494	48,71
11.11.12	PEULIMBANG	207	3.516	58,87
11.11.13	KOTA JUANG	600	13.207	45,43
11.11.14	KUALA	280	5.424	51,62
11.11.15	PSG SIBLAH KRUENG	180	3.435	52,4
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	228	4.170	54,68
11.11.17	KUTA BLANG	381	6.329	60,2
JUMLAH		6.636	121.994	54,40

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

b. Angka Kelahiran Kasar

Angka kelahiran kasar menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama tanpa memandang

umur dan jenis kelamin. Angka kelahiran kasar Kabupaten Bireuen adalah 14,34 yang artinya terdapat 14-15 kelahiran per 1000 penduduk di Kabupaten Bireuen.

TABEL 4.26
JUMLAH ANGKA KELAHIRAN KASAR

KODE	WILAYAH	JML LAHIR	JML TENGAH THN	Angka Kelahiran Kasa (CBR)
11.11.01	SAMALANGA	346	27.149	12,74
11.11.02	JEUNIEB	428	27.130	15,78
11.11.03	PEUDADA	437	29.957	14,59
11.11.04	JEUMPA	599	39.796	15,05
11.11.05	PEUSANGAN	760	55.392	13,72
11.11.06	MAKMUR	274	16.638	16,47
11.11.07	GANDAPURA	354	25.183	14,06
11.11.08	PANDRAH	152	9.592	15,85
11.11.09	JULI	607	36.323	16,71
11.11.10	JANGKA	438	30.856	14,19
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	365	29.081	12,55
11.11.12	PEULIMBANG	207	13.230	15,65
11.11.13	KOTA JUANG	600	49.259	12,18
11.11.14	KUALA	280	20.314	13,78
11.11.15	PSG SIBLAH KRUENG	180	12.983	13,86
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	228	15.762	14,47
11.11.17	KUTA BLANG	381	24.191	15,75
JUMLAH		6.636	462.836	14,34

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

6. Kematian

Jumlah Kematian menunjukkan banyaknya penduduk yang mati di suatu tempat serta periode tertentu. Berikut disajikan data jumlah kematian di Kabupaten Bireuen jika kita lihat dari tabel di bawah ini.

Angka kematian Kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu. Berikut angka kematian kasar Kabupaten Bireuen berdasarkan kecamatan tahun 2024.

TABEL 4.27
JUMLAH ANGKA KEMATIAN

KODE	WILAYAH	JUMLAH KEMATIAN	JML PENDUDUK TENGAH THN	ANGKA KEMATIAN KASAR
11.11.01	SAMALANGA	163	27.149	6
11.11.02	JEUNIEB	127	27.130	4,68
11.11.03	PEUDADA	164	29.957	5,47
11.11.04	JEUMPA	229	39.796	5,75
11.11.05	PEUSANGAN	346	55.392	6,25
11.11.06	MAKMUR	83	16.638	4,99
11.11.07	GANDAPURA	199	25.183	7,9
11.11.08	PANDRAH	50	9.592	5,21
11.11.09	JULI	197	36.323	5,42
11.11.10	JANGKA	201	30.856	6,51
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	153	29.081	5,26
11.11.12	PEULIMBANG	82	13.230	6,2
11.11.13	KOTA JUANG	359	49.259	7,29
11.11.14	KUALA	115	20.314	5,66
11.11.15	PSG SIBLAH KRUENG	71	12.983	5,47
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	95	15.762	6,03
11.11.17	KUTA BLANG	154	24.191	6,37
JUMLAH		2.788	462.836	6,02

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat Angka Kematian di Kabupaten Bireuen sebanyak 2.788 jiwa angka kematian yang paling besar di kecamatan Kota Juang sebesar 359 jiwa (7,29 %) jika terlihat menurut angka kematian terkecil berada di kecamatan Pandrah hanya 50 jiwa (5,21 %).

4.2 KUALITAS PENDUDUK

Kualitas penduduk biasanya diukur dari tingkat kesehatan, pendidikan, masalah sosial dan lain sebagainya. Secara internasional, kualitas pembangunan manusia diukur dengan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari tingkat pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan yang diukur dengan penghasilan per kapita. Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah kependudukan dalam hal mutu kehidupan dan kemampuan sumber daya manusianya.

A. KESEHATAN

Kesehatan penduduk dapat dilihat dari tingkat fertilitas penduduk melalui rasio kelahiran anak dan jumlah perempuan usia subur serta rendah atau tingginya tingkat pertumbuhan penduduk melalui angka kematian penduduk pada usia tertentu di daerah tersebut.

1. Kelahiran

a. Angka Kelahiran menurut Umur

Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Kegunaan Indikator ASFR merupakan data dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk, untuk mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin dimasa yang akan datang. Hasil proyeksi penduduk merupakan basis data untuk perencanaan pembangunan manusia di tahun-tahun mendatang.

TABEL 4.28
JUMLAH ANGKA KELAHIRAN MENURUT UMUR

KLP UMUR PEREMPUAN	JML PEREMPUAN	JML KELAHIRAN HIDUP	ASFR
15-19	55	26	472,73
20-24	3.565	981	275,18
25-29	13.907	1.798	129,29
30-34	22.919	1.616	70,51
35-39	25.654	1.023	39,88
40-44	23.006	319	13,87
45-49	17.454	15	0,86
JUMLAH	106.560	5.778	18,44

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

b. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.

TABEL 4.29
JUMLAH ANGKA KELAHIRAN MENURUT UMUR

KLP UMUR PEREMPUAN	JML PEREMPUAN	JML KELAHIRAN HIDUP	TFR
15-19	55	26	2,36
20-24	3.565	981	1,38
25-29	13.907	1.798	0,65
30-34	22.919	1.616	0,35
35-39	25.654	1.023	0,20
40-44	23.006	319	0,07
45-49	17.454	15	-
JUMLAH	106.560	5.778	

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

c. Rasio Anak dan Ibu- Child Women Ratiol (CWR)

Rasio dan Ibu- Child Women Ratiol (CWR) adalah perbandingan antara anak dibawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk usia produktif (15-49 tahun) disuatu

wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi selama 5 tahun yang lalu.

TABEL 4.30
JUMLAH RASION ANAK PEREMPUAN (CWR)

KODE	WILAYAH	PEREMPUAN USIA 15 - 49 TAHUN	JMLH PDDK UMUR ANAK	RASIO ANAK WANITA (CWR)
11.11.01	SAMALANGA	6.860	2.445	35,64
11.11.02	JEUNIEB	7.064	2.695	38,15
11.11.03	PEUDADA	7.862	2.868	36,48
11.11.04	JEUMPA	10.568	3.834	36,28
11.11.05	PEUSANGAN	14.862	4.799	32,29
11.11.06	MAKMUR	4.355	1.659	38,09
11.11.07	GANDAPURA	6.544	2.292	35,02
11.11.08	PANDRAH	2.458	972	39,54
11.11.09	JULI	9.716	3.611	37,17
11.11.10	JANGKA	8.130	2.919	35,9
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	7.494	2.817	37,59
11.11.12	PEULIMBANG	3.516	1.298	36,92
11.11.13	KOTA JUANG	13.207	3.838	29,06
11.11.14	KUALA	5.424	1.729	31,88
11.11.15	PSG SIBLAH KRUENG	3.435	1.243	36,19
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	4.170	1.486	35,64
11.11.17	KUTA BLANG	6.329	2.153	34,02
JUMLAH		121.994	42.658	34,97

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

2. Kematian

a. Angka Kematian Bayi.

Angka kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probalitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun.

TABEL 4.31
ANGKA KEMATIAN BAYI KABUPATEN BIREUEN

KODE	WILAYAH	ANGKA KEMATIAN BAYI
11.11.01	SAMALANGA	3
11.11.02	JEUNIEB	3
11.11.03	PEUDADA	2
11.11.04	JEUMPA	6
11.11.05	PEUSANGAN	9
11.11.06	MAKMUR	2
11.11.07	GANDAPURA	5
11.11.08	PANDRAH	0
11.11.09	JULI	10
11.11.10	JANGKA	9
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	0
11.11.12	PEULIMBANG	3
11.11.13	KOTA JUANG	5
11.11.14	KUALA	1
11.11.15	PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	1
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	2
11.11.17	KUTA BLANG	3
JUMLAH		64

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, Tahun 2024

b. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup) setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawah anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tua pada saat konsepsi atau didapat selama hamilan. Berikut angka kematian bayi neonatal Kabupaten Bireuen berdasarkan kecamatan tahun 2024.

TABEL 4.32
ANGKA KEMATIAN NEONATAL
KABUPATEN BIREUEN

KODE	WILAYAH	ANGKA KEMATIAN NEONATAL		
		0 - 7 Hari	8 - 28 Hari	Jumlah
11.11.01	SAMALANGA	2	1	3
11.11.02	JEUNIEB	1	0	1
11.11.03	PEUDADA	0	2	2
11.11.04	JEUMPA	4	1	5
11.11.05	PEUSANGAN	4	5	9
11.11.06	MAKMUR	0	0	0
11.11.07	GANDAPURA	3	2	5
11.11.08	PANDRAH	0	0	0
11.11.09	JULI	8	0	8
11.11.10	JANGKA	6	2	8
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	0	0	0
11.11.12	PEULIMBANG	2	0	2
11.11.13	KOTA JUANG	5	0	5
11.11.14	KUALA	0	0	0
11.11.15	PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	1	0	1
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	1	1	2
11.11.17	KUTA BLANG	2	0	2
JUMLAH		39	14	53

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, Tahun 2024

c. Angka Kematian Post Neonatal

Angka Kematian Post Neonatal adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh fakto-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar (dinyatakan dengan perseribu kelahiran hidup).

TABEL 4.33.
ANGKA KEMATIAN POST NEONATAL
KABUPATEN BIREUENA

KODE	WILAYAH	ANGKA KEMATIAN POST NEONATAL
11.11.01	SAMALANGA	0
11.11.02	JEUNIEB	2
11.11.03	PEUDADA	0
11.11.04	JEUMPA	1
11.11.05	PEUSANGAN	0
11.11.06	MAKMUR	2
11.11.07	GANDAPURA	0
11.11.08	PANDRAH	0
11.11.09	JULI	2
11.11.10	JANGKA	1
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	0
11.11.12	PEULIMBANG	1
11.11.13	KOTA JUANG	0
11.11.14	KUALA	1
11.11.15	PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	0
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	0
11.11.17	KUTA BLANG	1
JUMLAH		11

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, Tahun 2024

d. Angka Kematian Anak

Angka Kematian Anak adalah jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu, jadi Angka Kematian Anak tidak termasuk kematian bayi

e. Angka Kematian Balita

Angka kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

TABEL 4.34
ANGKA KEMATIAN BALITA KABUPATEN BIREUEN

KODE	WILAYAH	ANGKA KEMATIAN BALITA
11.11.01	SAMALANGA	3
11.11.02	JEUNIEB	3
11.11.03	PEUDADA	2
11.11.04	JEUMPA	6
11.11.05	PEUSANGAN	12
11.11.06	MAKMUR	2
11.11.07	GANDAPURA	5
11.11.08	PANDRAH	0
11.11.09	JULI	10
11.11.10	JANGKA	11
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	0
11.11.12	PEULIMBANG	3
11.11.13	KOTA JUANG	5
11.11.14	KUALA	1
11.11.15	PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	1
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	2
11.11.17	KUTA BLANG	4
JUMLAH		70

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, Tahun 2024.

f. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

TABEL 4.35.
ANGKA KEMATIAN IBU KABUPATEN BIREUEN

KODE	WILAYAH	ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)
11.11.01	SAMALANGA	0
11.11.02	JEUNIEB	1
11.11.03	PEUDADA	0
11.11.04	JEUMPA	0
11.11.05	PEUSANGAN	0
11.11.06	MAKMUR	1
11.11.07	GANDAPURA	1
11.11.08	PANDRAH	0
11.11.09	JULI	0
11.11.10	JANGKA	1
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	1
11.11.12	PEULIMBANG	0
11.11.13	KOTA JUANG	0
11.11.14	KUALA	0
11.11.15	PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	1
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	1
11.11.17	KUTA BLANG	0
JUMLAH		7

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, Tahun 2024.

Jika dilihat dari tabel diatas bahwa kematian ibu di Kabupaten Bireuen sebanyak 9 jiwa, Jenis kematian ibu hamil sebanyak 4 jiwa, Kematian ibu melahirkan sebanyak 4 Jiwa sedangkan perempuan Nifas sebanyak 1 jiwa.

B. PENDIDIKAN

Indikator untuk mengukur kualitas penduduk di bidang pendidikan di suatu wilayah antara lain dapat dilihat dari Angka Melek Huruf Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.

1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji dll) terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.

TABEL 4.36.
ANGKA MELEK AKSARA MENURUT JENIS KELAMIN DAN UMUR

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	15-19	99,69	99,84
2	20-24	100,00	0,00
3	25-29	100,00	0,00
4	30-34	99,41	0,00
5	35-39	100,00	0,00
6	40-44	99,70	99,80
7	45-49	99,53	99,23
8	50+	97,89	98,26
Jumlah		98,85	99,58

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Angka partisipasi kasar mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah tanpa melihat umur siswa pada masing-masing jenjang pendidikan.

TABEL 4.37.
ANGKA PARTISIPASI KASAR KABUPATEN BIREUEN

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2023	2024
SD / MI/ Sederajat	108,26	109,33
SMP/MTs/Sederajat	94,08	90,36
SMA/SMK/MA/Sederajat	94,78	88,32

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023 dan 2024.

APK SD di Kabupaten Bireuen berada di atas 100, artinya masih terdapat penduduk penduduk usia sekolah yang tidak melaksanakan pendidikan pada jenjang pendidikan SD dan semakin tinggi APK semakin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah. Kondisi ini menunjukkan wajib belajar 6 tahun masih hampir tercapai sesuai harapan. Untuk itu pemerintah perlu menciptakan terobosan-terobosan dalam rangka meningkatkan wajib belajar.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni menunjukkan partisipasi sekolah penduduk sesuai dengan usia sekolahnya tingkat pendidikan tertentu, sehingga APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan APK, APM, Merupakan Indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut yang lebih baik dibandingkan dengan APK.

TABEL 4.38.
ANGKA PARTISIPASI KASAR KABUPATEN BIREUEN

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	
	2023	2024
SD / MI/ Sederajat	98,3	98,33
SMP/MTs/Sederajat	81,51	81,31
SMA/SMK/MA/Sederajat	70,03	67,72

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023 dan 2024.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Kriterianya Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%. Kegunaanya untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai.

C. EKONOMI

Dari sisi ekonomi, ketenagakerjaan merupakan salah satu isu penting di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan yakni isu pengangguran. Karena permasalahan pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seiring dengan penyerapan tenaga kerja atau dengan kata lain, jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Target nasional tahun 2024 setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap mencapai 450 ribu orang. Dalam ilmu ekonomi, salah satu faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Akibat tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja atau ketidak mampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia berdampak banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat masuk ke pasar kerja (pengangguran).

1. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*Manpower*) dapat dilihat menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) yang bekerja dan yang tidak bekerja. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja ialah penduduk usia kerja yang pekerjaannya adalah mengurus rumah tangga, pelajar/mahasiswa dan pensiunan.

Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja

cenderung menurun. Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja.

Selanjutnya, angkatan kerja dibedakan menjadi dua sub kelompok yaitu pekerja dan tidak/belum bekerja. Penduduk usia kerja Batas usia kerja penduduk yang diberlakukan pada Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bireuen ini adalah penduduk berusia 15-64 tahun karena dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif dan merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan.

TABEL 4.39
JUMLAH PROPORSI TENAGA KERJA

KODE	WILAYAH	PENDUDUK USIA KERJA	JUMLAH PENDUDUK	PERSEN TENAGA KERJA
11.11.01	SAMALANGA	17.686	27.450	64,43
11.11.02	JEUNIEB	17.662	27.509	64,2
11.11.03	PEUDADA	19.416	30.346	63,98
11.11.04	JEUMPA	26.287	40.335	65,17
11.11.05	PEUSANGAN	37.465	56.143	66,73
11.11.06	MAKMUR	10.969	16.883	64,97
11.11.07	GANDAPURA	16.660	25.467	65,42
11.11.08	PANDRAH	6.219	9.782	63,58
11.11.09	JULI	23.780	36.778	64,66
11.11.10	JANGKA	20.559	31.164	65,97
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	19.009	29.454	64,54
11.11.12	PEULIMBANG	8.578	13.363	64,19
11.11.13	KOTA JUANG	33.772	49.735	67,9
11.11.14	KUALA	13.711	20.523	66,81
11.11.15	PSG SIBLAH KRUENG	8.617	13.135	65,6
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	10.472	16.078	65,13
11.11.17	KUTA BLANG	16.333	24.551	66,53
JUMLAH		307.195	468.696	65,54

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

mungkin disebabkan oleh berbagai faktor yang mengharuskan perempuan tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk tingkat pendidikan menengah, persentase tenaga kerja perempuan yang tamat SLTP hampir menyamai tenaga kerja laki-laki, sedangkan yang tamat SLTA tenaga kerja perempuan lebih rendah

dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki. Begitupula untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi (D-I/D-II, D-III/Sarmud, D-IV/S-1, S2 dan S3).

Jumlah dan Proporsi penduduk bekerja dan Pengangguran

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki

TABEL 4.40
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) DAN PARTISIPASI
ANGKATAN KERJA (TPAK) KABUPATEN BIREUEN
TAHUN, 2019-2024

Tahun	TPT/UR			TPAK/LFPR		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2019	3,25	4,79	3,88	82,72	52,7	67,1
2020	4,58	3,45	4,12	82,12	53,06	67,06
2021	3,86	5,01	4,32	81,82	51,11	65,91
2022	3,39	5,4	4,2	79,62	50,23	64,39
2023	4,46	3,68	4,14	82,07	52,56	66,96
2024	4,15	3,62	3,93	80,74	54,36	67,24

Sumber/Source: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus (August National Labor Force Survey)

D. SOSIAL

1. Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

TABEL 4.41
JUMLAH PENERIMA BANTUAN (KEPALA KELUARGA) DAN BANSOS
PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2024

Kecamatan	Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga)	
	Rencana	Realisasi
Samalanga	1.051	1.051
Simpang Mamplam	1.398	1.398
Pandrah	552	552
Jeunib	1.373	1.373
Peulimbang	725	725
Peudada	1.603	1.603
Juli	1.828	1.828
Jeumpa	1.737	1.737
Kota Juang	1.005	1.005
Kuala	761	761
Jangka	1.595	1.595
Peusangan	1.703	1.703
Peusangan Selatan	857	857
Peusangan Siblah Krueng	810	810
Makmur	962	962
Gandapura	965	965
Kutablang	1.030	1.030
Total	19.955	19.955

Sumber: Data dari Dinas Sosial Kabupaten Bireuen Tahun 2024.

2. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat

Salah satu jenis PMKS yang dapat disajikan dari database kependudukan adalah penyandang disabilitas (penyandang cacat). Data dan informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan dalam rangka memberikan program pelayanan public, dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah penyandang cacat, pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya. Selama ini perhatian pemerintah dianggap masih kurang dan masih banyak perlakuan diskrimintif dalam pelayanan publik kepada kelompok ini dan kebijakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas (penyandang cacat) masih bersifat *charity* (belas kasihan). Kurangnya sosialisasi peraturan yang

berkaitan dengan penyandang disabilitas ini menyebabkan perlakuan yang kurang peduli, seperti berbagai kantor pelayanan publik belum ramah penyandang cacat terutama cacat fisik, bahkan untuk pelayanan administrasi kependudukan.

TABEL 4.42
JUMLAH PENDUDUK PENYANDANG CACAT
DI KABUPATEN BIREUEN

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kota Juang	64
2	Jeumpa	68
3	Jeunieb	55
4	Juli	33
5	Kuala	27
6	Pandrah	18
7	Peudada	64
8	Peulimbang	38
9	Samalanga	192
10	Simpang Mamplam	68
11	Gandapura	105
12	Kuta Blang	69
13	Makmur	51
14	Jangka	59
15	Peusangan	74
16	Peusangan Selatan	38
17	Peusangan Siblah Krueng	62

Sumber: Data dari Dinas Sosial Kabupaten Bireuen Tahun 2024.

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yakni pemerintah kabupaten/kota menghapus praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Sedangkan hak-haknya adalah bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan

fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Langkah yang perlu ditempuh pemerintah Kabupaten Bireuen dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas yakni menjamin akses penyandang disabilitas terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau sarana umum baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, atas dasar kesetaraan dimana dalamnya harus termasuk identifikasi dan penghapusan semua hambatan terhadap aksesibilitas.

Berkaitan dengan akses kerja penyandang cacat, komitmen pemerintah dalam peningkatan persamaan hak untuk memperoleh kesempatan kerja bagi setiap orang Indonesia termasuk penyandang cacat telah tertuang dan diamanatkan dalam UUD 1945,

3. Proporsi penduduk penerima Askeskin

TABEL 4.43
PROPORSI PENDUDUK MISKIN PENERIMA ASKESKIN

KODE	WILAYAH	PBI APBN
11.11.01	SAMALANGA	12.470
11.11.02	JEUNIEB	13.302
11.11.03	PEUDADA	14.120
11.11.04	JEUMPA	18.969
11.11.05	PEUSANGAN	19.218
11.11.06	MAKMUR	10.807
11.11.07	GANDAPURA	12.200
11.11.08	PANDRAH	5.309
11.11.09	JULI	16.459
11.11.10	JANGKA	17.753
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	15.552
11.11.12	PEULIMBANG	5.885
11.11.13	KOTA JUANG	13.626
11.11.14	KUALA	9.502
11.11.15	PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	8.471
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	7.733
11.11.17	KUTA BLANG	13.741
JUMLAH		215.117

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Bireuen

Jumlah penerima askeskin PBI APBN di Kabupaten Bireuen pada tahun 2024 tercatat 215.117 jiwa. Yang menerima askeskin paling banyak di Kecamatan Peusangan 19.218 jiwa sedangkan yang menerima Askeskin yang pali kecil adal di Kecamatan Pandrah sebanyak 5.309 jiwa.

4.3 MOBILITAS PENDUDUK

Perpindahan penduduk (migrasi atau mobilitas) merupakan salah satu dari tiga komponen utama pertumbuhan penduduk yang dapat menambah atau mengurangi jumlah penduduk. Komponen ini bersama dengan kelahiran dan kematian mempengaruhi dinamika penduduk di suatu wilayah seperti jumlah, komposisi, dan distribusi keruangan. Tinjauan migrasi secara regional sangat penting dilakukan terutama terkait dengan kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya faktor-faktor pendorong dan penarik bagi penduduk untuk melakukan migrasi, kelancaran sarana transportasi antar wilayah, dan pembangunan wilayah dalam kaitannya dengan desentralisasi pembangunan.

Analisis dan perkiraan besaran dan arus perpindahan penduduk (migrasi atau mobilitas) merupakan hal yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya. Pada hakikatnya migrasi penduduk merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhannya lebih rendah akan berpindah menuju daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Namun pada sisi lain, aliran ekonomi baru migrasi (*new economics of migration*) beranggapan bahwa perpindahan penduduk terjadi bukan saja berkaitan dengan pasar kerja, namun juga karena adanya faktor-faktor lain. Keputusan untuk melakukan migrasi tidak semata-mata merupakan keputusan individu, namun terkait dengan lingkungan sekitar, utamanya lingkungan keluarga dan kondisi daerah yang ditinggali maupun yang dituju. Lingkungan sekitar ini termasuk juga kondisi politik, agama dan bencana alam. Dari kedua teori di atas jelas, bahwa migrasi disebabkan oleh faktor pendorong (*push factor*) suatu wilayah dan faktor penarik (*pull factor*) wilayah lainnya. Faktor pendorong suatu wilayah menyebabkan orang pindah ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan bagi penduduknya. Perpindahan penduduk ini juga terkait dengan persoalan kemiskinan dan

pengangguran yang terjadi di suatu wilayah. Sedangkan faktor penarik suatu wilayah adalah jika wilayah tersebut mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber-sumber penghidupan bagi penduduk, baik penduduk di wilayah itu sendiri maupun penduduk di sekitarnya dan daerah-daerah lain. Penduduk wilayah sekitarnya dan daerah-daerah lain yang merasa tertarik dengan daerah tersebut kemudian berpindah dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

1. MIGRASI MASUK

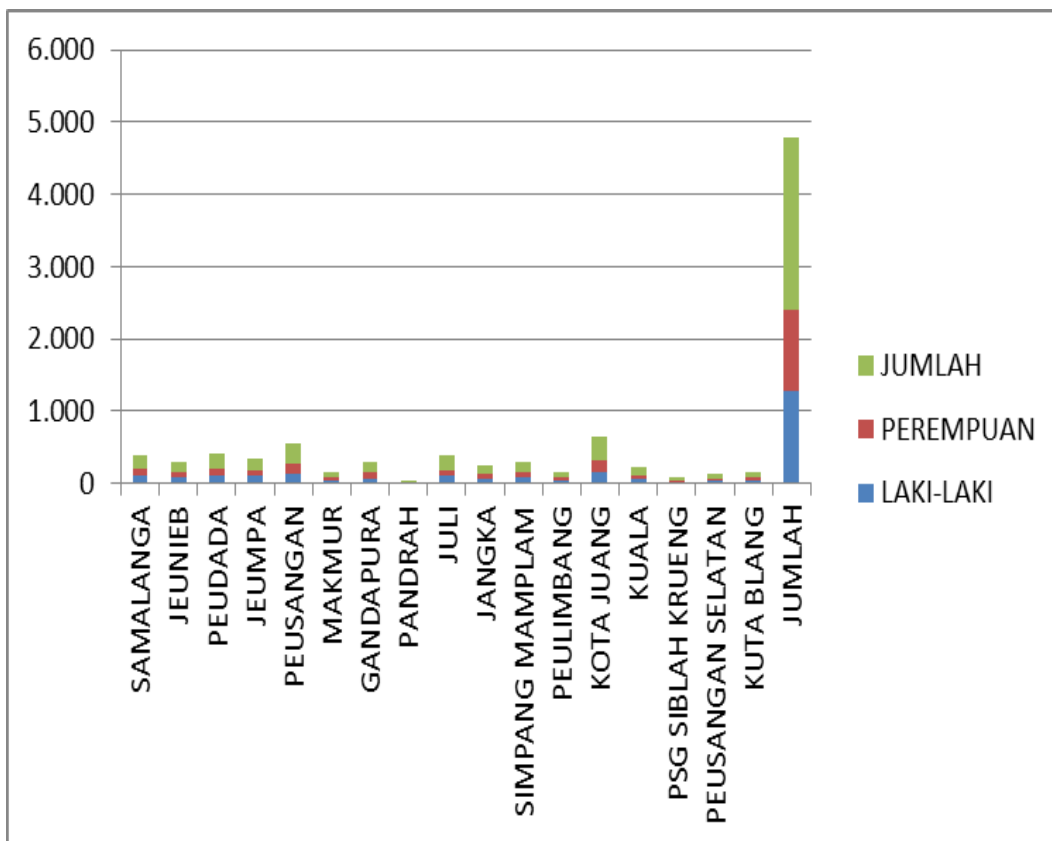
Jumlah penduduk dari luar Provinsi Aceh yang masuk ke Kabupaten Bireuen selama tahun 2024 sebanyak 2.188 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 1.127 dan perempuan 1.061 jiwa.

Table 4.44
JUMLAH MIGRASI MASUK

KODE	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
11.11.01	SAMALANGA	82	68	150
11.11.02	JEUNIEB	64	68	132
11.11.03	PEUDADA	72	86	158
11.11.04	JEUMPA	94	86	180
11.11.05	PEUSANGAN	133	127	260
11.11.06	MAKMUR	38	42	80
11.11.07	GANDAPURA	68	74	142
11.11.08	PANDRAH	29	23	52
11.11.09	JULI	99	82	181
11.11.10	JANGKA	73	58	131
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	83	48	131
11.11.12	PEULIMBANG	40	33	73
11.11.13	KOTA JUANG	116	106	222
11.11.14	KUALA	46	40	86
11.11.15	PSG SIBLAH KRUENG	16	17	33
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	34	47	81
11.11.17	KUTA BLANG	40	56	96
JUMLAH		1.127	1.061	2.188

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

GRAFIK MIGRASI MASUK



Gambar grafik jumlah migrasi masuk laki-laki dan perempuan ke Kabupaten Bireuen Tahun 2024

2. MIGRASI KELUAR

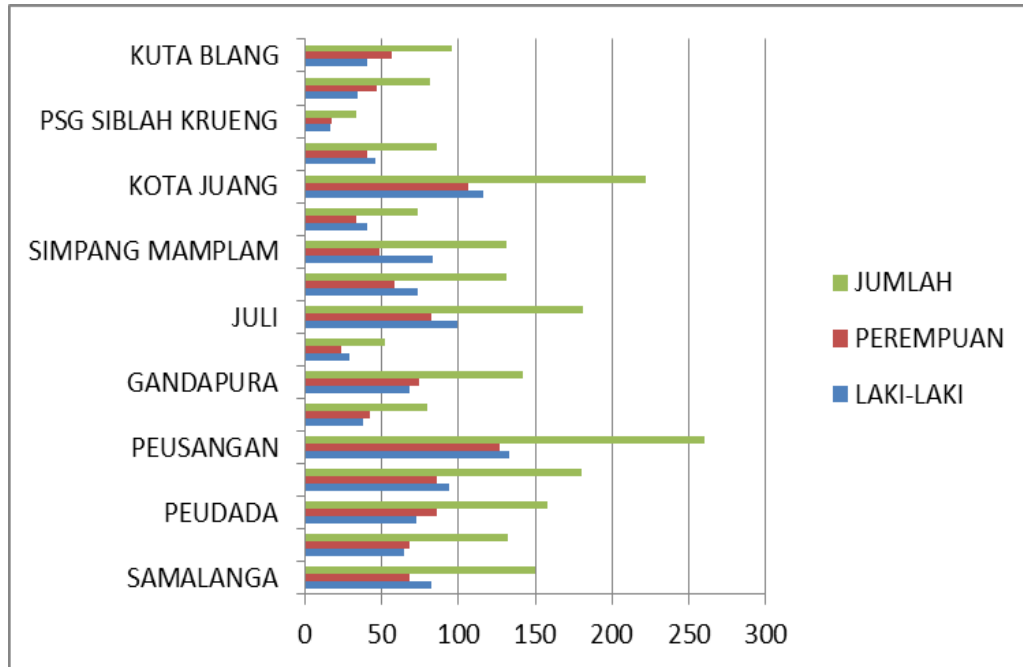
Jumlah penduduk dari Kabupaten Bireuen yang pindah keluar Provinsi Aceh selama tahun 2024 sebanyak 2.398 dengan rincian laki-laki sebanyak 1.267 dan perempuan 1.131 jiwa.

TABEL 4.45
JUMLAH MIGRASI KELUAR

KODE	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
11.11.01	SAMALANGA	104	95	199
11.11.02	JEUNIEB	73	73	146
11.11.03	PEUDADA	114	93	207
11.11.04	JEUMPA	102	74	176
11.11.05	PEUSANGAN	139	139	278
11.11.06	MAKMUR	42	35	77
11.11.07	GANDAPURA	63	81	144
11.11.08	PANDRAH	15	8	23
11.11.09	JULI	103	86	189
11.11.10	JANGKA	71	54	125
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	79	67	146
11.11.12	PEULIMBANG	44	35	79
11.11.13	KOTA JUANG	160	158	318
11.11.14	KUALA	58	51	109
11.11.15	PSG SIBLAH KRUENG	25	14	39
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	30	30	60
11.11.17	KUTA BLANG	45	38	83
JUMLAH		1.267	1.131	2.398

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024

GRAFIK MIGRASI KELUAR



Gambar grafik jumlah migrasi keluar laki-laki dan perempuan dari Kabupaten Bireuen Tahun 2024

BAB V

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen Kependudukan seperti KIA, KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemilikinya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta, memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

a. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sesuai kesepakatan didalam keluarga tersebut.

TABEL 5.1
JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA DI
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

KODE	WILAYAH	KEPALA KELUARGA		JUMLAH KEPALA KELUARGA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
11.11	BIREUEN	101.704	40.551	142.255
11.11.01	SAMALANGA	6.000	2.500	8.500
11.11.02	JEUNIEB	6.009	2.499	8.508
11.11.03	PEUDADA	6.668	2.680	9.348
11.11.04	JEUMPA	8.741	3.155	11.896
11.11.05	PEUSANGAN	12.025	5.036	17.061
11.11.06	MAKMUR	3.553	1.546	5.099
11.11.07	GANDAPURA	5.375	2.477	7.852
11.11.08	PANDRAH	2.119	894	3.013
11.11.09	JULI	8.081	2.710	10.791
11.11.10	JANGKA	6.437	2.848	9.285
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	6.566	2.403	8.969
11.11.12	PEULIMBANG	2.910	1.116	4.026
11.11.13	KOTA JUANG	10.906	4.172	15.078
11.11.14	KUALA	4.535	1.686	6.221
11.11.15	PSG SIBLAH KRUENG	2.864	1.199	4.063
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	3.552	1.488	5.040
11.11.17	KUTA BLANG	5.363	2.142	7.505

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Tahun 2024,

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecatatan dan lain sebagainya.

b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk

wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

TABEL 5.2
JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN KTP	USIA 17 TAHUN KE ATAS
1	SAMALANGA	18.599	18.690
2	JEUNIEB	18.141	18.318
3	PEUDADA	20.243	20.441
4	JEUMPA	26.806	27.036
5	PEUSANGAN	38.688	38.917
6	MAKMUR	11.376	11.451
7	GANDAPURA	17.386	17.521
8	PANDRAH	6.403	6.531
9	JULI	24.402	24.572
10	JANGKA	21.187	21.373
11	SIMPANG MAMPLAM	19.524	19.681
12	PEULIMBANG	8.701	8.864
13	KOTA JUANG	34.864	35.026
14	KUALA	14.113	14.267
15	PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	8.957	9.081
16	PEUSANGAN SELATAN	10932	10.988
17	KUTA BLANG	16931	17.172
TOTAL		317.253	319.929

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Tahun 2024,

c. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah merupakan program yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang kartu Identitas Anak. KIA berfungsi sama dengan KTP yang di Peruntukkan untuk anak berusia 0-5 tahun, dan 5-17 tahun kurang satu hari. Perbedaannya, KIA untuk bayi dan balita tidak menampilkan Foto, sedangkan 5-17 tahun kurang satu hari menampilkan Foto.

Tujuan adanya KIA adalah untuk melindungi hak konstitusional Anak sebagai warga Negara Indonesia. Menurut Permendagri Nomor .2 tahun 2016, KIA memiliki beberapa manfaat diantara lain:

- Melindungi pemenuhan hak anak .
- Menjamin akses sarana umum.
- Menjadi bukti identifikasi diri ketika anak mengalami peristiwa buruk.
- Mencegah terjadinya perdagangan Anak.
- Memudahkan Anak mendapatkan Akses pada pelayanan publik seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, perbangan, tanfortasi dan Imigrasi.

TABEL 5.3
JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

KODE	WILAYAH	JML ANAK USIA 0-17	JML ANAK MEMILIKI KIA	JML ANAK BELUM MEMILIKI KIA	PERSENTA SE KEPEMILIKAN (%)
11.11.01	SAMALANGA	8.410	4.543	3.915	54,02
11.11.02	JEUNIEB	8.785	3.847	5.008	43,79
11.11.03	PEUDADA	9.558	4.834	4.832	50,58
11.11.04	JEUMPA	12.834	7.303	5.673	56,90
11.11.05	PEUSANGAN	16.670	10.456	6.401	62,72
11.11.06	MAKMUR	5.199	2.985	2.290	57,41
11.11.07	GANDAPURA	7.687	4.186	3.596	54,46
11.11.08	PANDRAH	3.108	1.462	1.666	47,04
11.11.09	JULI	11.795	6.675	5.287	56,59
11.11.10	JANGKA	9.446	4.667	4.822	49,41
11.11.11	SP MAMPLAM	9.452	3.922	5.564	41,49
11.11.12	PEULIMBANG	4.337	2.041	2.330	47,06
11.11.13	KOTA JUANG	14.322	6.320	8.083	44,13
11.11.14	KUALA	6.050	3.832	2.270	63,34
11.11.15	PSG S. KRUENG	3.892	2.115	1.816	54,34
11.11.16	PSG SELATAN	4.851	2.566	2.332	52,90
11.11.17	KUTA BLANG	7.062	4.288	2.885	60,72
KABUPATEN BIREUEN		143.458	76.042	68.770	53,01

, Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester II Tahun 2024.

d. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.

1. Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya.

TABEL 5.4
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN USIA 0-18 TAHUN
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

KODE	WILAYAH	JML WAJIB AKTA	JML MEMILIKI AKTA	JML BELUM MEMILIKI	(%)
11,11	BIREUEN	152.669	142.893	9.776	93,60
11.11.01	SAMALANGA	8.881	7.970	911	89,74
11.11.02	JEUNIEB	9.392	8.360	1.032	89,01
11.11.03	PEUDADA	10.195	9.714	481	95,28
11.11.04	JEUMPA	13.645	12.482	1.163	91,48
11.11.05	PEUSANGAN	17.739	16.956	783	95,59
11.11.06	MAKMUR	5.542	5.229	313	94,35
11.11.07	GANDAPURA	8.136	7.356	780	90,41
11.11.08	PANDRAH	3.377	3.184	193	94,28
11.11.09	JULI	12.491	11.490	1.001	91,99
11.11.10	JANGKA	10.080	9.718	362	96,41
11.11.11	SIMPANG MAMPLAM	9.901	9.256	645	93,49
11.11.12	PEULIMBANG	4.632	4.381	251	94,58
11.11.13	KOTA JUANG	15.190	14.496	694	95,43
11.11.14	KUALA	6.416	6.113	303	95,28
11.11.15	PSG SIBLAH KRUENG	4.207	3.860	347	91,75
11.11.16	PEUSANGAN SELATAN	5.201	5.002	199	96,17
11.11.17	KUTA BLANG	7.644	7.326	318	95,84

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Tahun 2024,

Tabel. 5.4 Menggambarkan kepemilikan akta kelahiran penduduk Kabupaten Bireuen terhadap total Sebanyak 142.893 orang penduduk Kabupaten Bireuen, terlihat bahwa

persentase kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Bireuen sebesar 142.893 orang, sedangkan 9.776 orang belum mempunyai akta kelahiran.

2. Akta Perkawinan

Akta kawin merupakan identitas atas penduduk yang bersetatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.

TABEL 5.6
KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN DI
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

NO	WILAYAH	STATUS KAWIN	MEMILIKI AKTA KAWIN	BELUM MEMILIKI AKTA KAWIN	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
	BIREUEN	190.737	130.269	60.468	68,30
1	SAMALANGA	11.255	7.200	4.055	63,97
2	JEUNIEB	11.468	7.235	4.233	63,09
3	PEUDADA	12.525	8.022	4.503	64,05
4	JEUMPA	16.524	11.180	5.344	67,66
5	PEUSANGAN	22.408	15.958	6.450	71,22
6	MAKMUR	6.766	4.528	2.238	66,92
7	GANDAPURA	10.087	7.252	2.835	71,89
8	PANDRAH	4.032	2.501	1.531	62,03
9	JULI	15.154	10.674	4.480	70,44
10	JANGKA	12.028	8.384	3.644	69,70
11	SP MAMPLAM	12.457	8.028	4.429	64,45
12	PEULIMBANG	5.531	3.409	2.122	61,63
13	KOTA JUANG	20.050	14.435	5.615	72
14	KUALA	8.455	5.655	2.800	66,88
15	PSG SIBLAH KRUENG	5.358	3.825	1.533	71,39
16	PEUSANGAN SELATAN	6.701	4.435	2.266	66,18
17	KUTA BLANG	9.938	7.548	2.390	75,95

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Tahun 2024.

3. Akta Perceraian

Akta perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Akta cerai adalah suatu bukti autentik tentang putusannya suatu ikatan perkawinan. Apabila Akta Perkawinan di dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil bagi penduduk non muslim, maka perceraian harus melalui Pengadilan Negeri, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baru dicatatkan dalam daftar perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bagi Pemerintah, dengan pencatatan perceraian dapat di peroleh peristiwa yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan keluarga dan penetapan kebijakan pembangunan lainnya.

TABEL 5.7
KEPEMILIKAN AKTA PERCERAIAN DI
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

NO	WILAYAH	JML STATUS CERAI	MEMILIKI AKTA CERAI	BELUM MEMILIKI AKTA CERAI	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
	BIREUEN	6.660	3.859	2.801	57,94
1	SAMALANGA	378	244	134	64,55
2	JEUNIEB	461	205	256	44,47
3	PEUDADA	482	265	217	54,98
4	JEUMPA	526	328	198	62,36
5	PEUSANGAN	812	525	287	64,66
6	MAKMUR	196	89	107	45,41
7	GANDAPURA	344	195	149	56,69
8	PANDRAH	153	76	77	49,67
9	JULI	529	314	215	59,36
10	JANGKA	352	210	142	59,66
11	SP MAMPLAM	383	202	181	52,74
12	PEULIMBANG	188	93	95	49,47
13	KOTA JUANG	834	550	284	65,95
14	KUALA	316	181	135	57,28
15	PSG SIBLAH KRUENG	186	83	103	44,62
16	PSG SELATAN	215	100	115	46,51
17	KUTA BLANG	305	199	106	65,25

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Tahun 2024,

4. Akta Kematian

Menurut amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua Dusun dan Geuchik Gampong bersangkutan di laporkan ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak tanggal kematian. Kemudian pejabat pencatatan Sipil mencatat pada Registrasi Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Berikut Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah Kepemilikan akta kematian di Kabupaten Bireuen hingga tahun 2024.

TABEL 5.8
KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN DI
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	null	2.141	1.041	3.182
2	SAMALANGA	943	509	1.452
3	JEUNIEB	868	328	1.196
4	PEUDADA	1.103	534	1.637
5	JEUMPA	1.373	684	2.057
6	PEUSANGAN	2.229	1.210	3.439
7	MAKMUR	586	265	851
8	GANDAPURA	1.028	525	1.553
9	PANDRAH	331	146	477
10	JULI	1.196	571	1.767
11	JANGKA	1.243	734	1.977
12	SIMPANG MAMPLAM	906	470	1.376
13	PEULIMBANG	441	195	636
14	KOTA JUANG	1.837	1.048	2.885
15	KUALA	683	391	1.074
16	PSG SIBLAH KRUENG	495	284	779
17	PEUSANGAN SELATAN	608	282	890
18	KUTA BLANG	986	611	1.597
	TOTAL	18.997	9.828	28.825

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Tahun 2024,

BAB VI

KESIMPULAN

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bireuen Tahun 2024 merupakan gambaran perkembangan kependudukan Kabupaten Bireuen pada tahun 2024, berdasarkan data Pelayanan yang menggunakan aplikasi SIAK Terpusat dan dikonsolidasikan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Data Konsolidasi Bersih.

Profil perkembangan kependudukan Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang cenderung stabil dan meningkat. Distribusi penduduk dengan kepadatan tinggi masih terkonsentrasi di Kecamatan Peusangan dan Kota Juang, sementara dengan kepadatan rendah di wilayah Kecamatan Pandrah. Tingkat kepemilikan Akta kelahiran mencapai 142.983 lembar, tingkat kepemilikan Akta kematian 28.825 lembar dan angka migrasi keluar 2.398 jiwa sedangkan migrasi masuk 2.188 jiwa, memberikan gambaran tentang dinamika kependudukan di Kabupaten Bireuen. Kualitas penduduk, yang tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi, perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Data yang valid dan akurat juga sangat tergantung pada karakter dan perilaku masyarakat sendiri sehingga diharapkan masyarakat mau melakukan registrasi atau pelaporan terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami diri atau orang di sekitarnya. Juga senantiasa mengisi biodata atau memperbaharui data kependudukannya dengan benar dan lengkap, serta tidak terlambat melakukan pelaporan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Profil ini dapat juga memberikan gambaran pengambilan kebijakan dalam perencanaan program pembangunan di Kabupaten Bireuen yang bermanfaat bagi Instansi dan berbagai pihak yang membutuhkan.

Kami menyadari bahwa Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bireuen tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran untuk perbaikan Profil Kependudukan mendatang, baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan, sangat kami harapkan.

